

Edisi 2/ Juli - Agustus 2012

# PROGRES



MEDIA KOMUNIKASI TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)

## GERAKAN AKSI NASIONAL PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA



**Menekan Jumlah Angka Pengangguran**  
**Meningkatkan Kualitas Pendidikan**



## Upaya Menekan Angka Pengangguran

**K**hawatir dengan semakin bertambahnya jumlah pengangguran setiap tahun, maka pemerintah berupaya untuk menekan jumlah angka tersebut. Diantaranya dengan melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Menurut data Badan Pusat Statistik jumlah pengangguran terbuka sudah mencapai sekitar 8.117.631 orang pada Februari 2011, selang 6 bulan kemudian yakni Agustus 2011, jumlahnya telah mengalami penurunan menjadi 7.700.086 orang. Meski mengalami penurunan namun dirasakan belum memuaskan.

Melalui kantor Wakil Presiden yang dimotori oleh Kedeputusan Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan, beserta Bappenas, pada bulan Mei hingga Juni lalu, telah mengundang pejabat eselon 1 dari berbagai kementerian dan lembaga untuk melakukan rapat kerja terkait dengan penciptaan lapangan kerja.

Terhitung telah tiga kali dilangsungkan rapat untuk menggodok masalah tersebut. Menurut Deputi Sekretaris Wakil Presiden bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan, rapat bertujuan untuk mempertajam program-program penciptaan lapangan kerja yang ada

di kementerian dan lembaga. Karena memang banyak program-program penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas tenaga kerja tersebar di berbagai kementerian dan lembaga yang hasilnya belum maksimal.

Dari Rapat kerja kementerian dan lembaga tersebut kemudian menghasilkan 5 pilar utama program-program perluasan dan penciptaan lapangan kerja yang selanjutnya akan dibawa dalam rapat koordinasi antara Wakil Presiden, Menteri, dan pimpinan lembaga terkait untuk dijadikan Gerakan Aksi Nasional Penciptaan Lapangan Kerja.

Selain masalah penciptaan lapangan kerja, pada edisi kali ini redaksi juga menurunkan berita tentang akan digunakannya data Basis Data Terpadu untuk program Raskin. Selanjutnya ada juga tentang upaya pemerintah untuk melakukan swasembada pangan pada tahun 2014 nanti. Dari Kementerian Sosial ada langkah untuk memutus rantai kemiskinan dengan melakukan program Bedah Kampung. Selanjutnya ada berita ringan lain seputar 17 Agustus 1945. Demikian yang dapat kami sajikan pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat membaca. ■

**Pelindung :**  
Wakil Presiden RI

**Penasehat :**

- Seswapres RI
- Deputi Seswapres Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan
- Staf Khusus Wapres Bidang Media Massa

**Penanggung Jawab :**  
Kepala Sekretariat TNP2K

**Pemimpin Redaksi :**  
Hamka Kurniawan

**Staf Redaksi :**  
Irwansyah  
K Kuncoro

**Tata Letak / Artistik :**  
Sojarwadi

**Alamat Redaksi:**  
Sekretariat TNP2K,  
Gd. Grand Kebon Sirih Lt. 4  
Jalan Kebon Sirih No. 35  
Jakarta Pusat 10110  
Telp. : 021-3912812  
Fax. : 021-3912511, 3912513  
Email : tnp2k@wapresri.go.id

Redaksi menerima tulisan, opini, foto dan surat pembaca yang diketik satu setengah spasi, panjang tulisan maksimal 2 halaman folio. Untuk tulisan dan opini panjang 5.000 karakter dengan disertai foto penulis dan biodata.

# Daftar Isi

## Laporan Utama



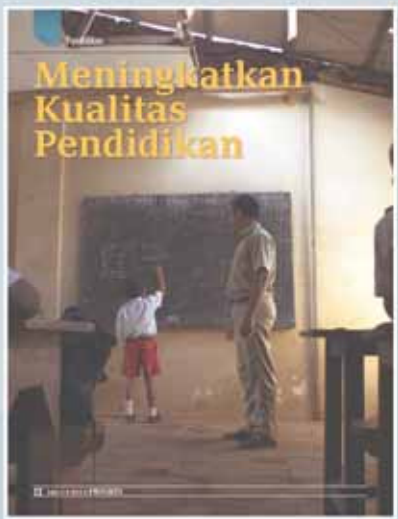
### Gerakan Aksi Nasional Penciptaan Lapangan Kerja

Pemerintah akan walai dalam meningkatkan secara nasional penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas angkatan kerja. Hal ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah yang sangat besar terhadap upaya pemenuhan angka pengangguran di Tanah Air, di tengah adanya krisis ekonomi dunia yang belum akan berakhir.

Pemerintah akan walai dalam meningkatkan secara nasional penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas angkatan kerja. Hal ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah yang sangat besar terhadap upaya pemenuhan angka pengangguran di Tanah Air, di tengah adanya krisis ekonomi dunia yang belum akan berakhir.

**3**

Pemerintah dalam waktu dekat akan menyiapkan rencana aksi nasional penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas angkatan kerja. Hal itu merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah yang sangat besar terhadap upaya penurunan angka pengangguran di Tanah Air, di tengah adanya krisis ekonomi dunia yang belum akan berakhir.



### Meningkatkan Kualitas Pendidikan

**12**

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional. Salah satu caranya adalah dengan mencanangkan program wajib belajar 9 tahun melalui program BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Selanjutnya ada program PMU (Pendidikan Menengah Universal) untuk jenjang SMA dan SMK.

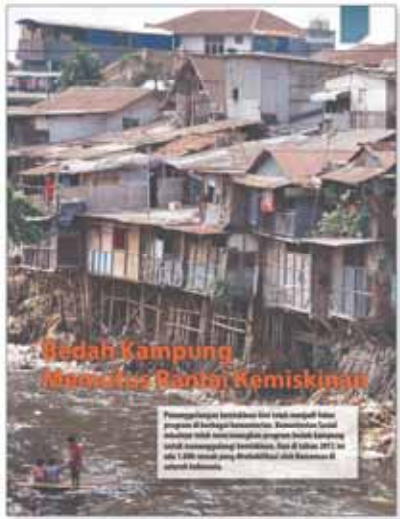


### 2014, Puncak Swasembada Pangan Berkelanjutan

Desa globalisasi saat ini telah menghadirkan sistem pangan nasional pada persaingan pasar yang semakin ketat. Berbagai produk pangan impor dengan kualitas dan harga yang lebih baik, berpotensi menekan kemampuan produksi pangan nasional. Peringatan ini berlatar tidak ada lagi petani lokal nasional karena banyak petani yang menjual produk dan komoditas dalam jumlah yang sangat besar kepada petani dan peternak. Untuk mencanangkan program ini, pemerintah berencana melaksanakan dan menegakan dalam pengisian produk serta mengupayakan daya saing petani melalui produk pangan nasional yang selangkah lebih diutamakan para petani di pedesaan.

**28**

Arus globalisasi saat ini telah menghadirkan sistem pangan nasional pada persaingan pasar yang semakin ketat. Berbagai produk pangan impor dengan kualitas dan harga yang lebih baik, berpotensi menekan kemampuan produksi pangan nasional.

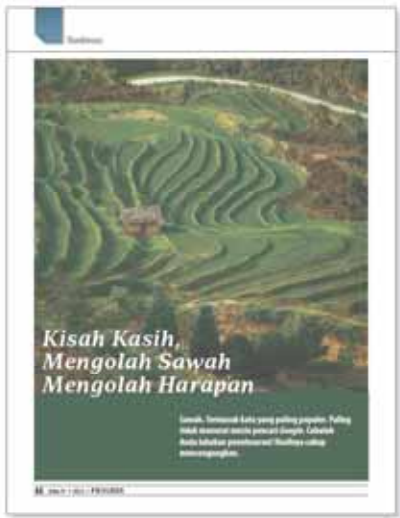


### Bedah Kampung Memerangi Kemiskinan

Pemangku kebijakan kini telah menjadi fokus program di berbagai kementerian. Kementerian Sosial misalnya telah mencanangkan program bedah kampung untuk menanggulangi kemiskinan. Pada di tahun 2012 ini ada 1.000 rumah yang direhabilitasi oleh Kemensos di seluruh Indonesia.

**31**

Pemangku kebijakan kini telah menjadi fokus program di berbagai kementerian. Kementerian Sosial misalnya telah mencanangkan program bedah kampung untuk menanggulangi kemiskinan. Dan di tahun 2012 ini ada 1.000 rumah yang direhabilitasi oleh Kemensos di seluruh Indonesia.



### Kisah Kasih, Mengolah Sawah Mengolah Harapan

**44**

### Rendevouz

Sawah. Termasuk kata yang paling populer. Paling tidak menurut mesin pencari Google. Cobalah Anda lakukan penelusuran! Hasilnya cukup mencengangkan.



PROGRES - IMAH

Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, Bambang Widianto memberikan arahan

# Gerakan Aksi Nasional Penciptaan Lapangan Kerja

Pemerintah dalam waktu dekat akan menyiapkan rencana aksi nasional penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas angkatan kerja. Hal itu merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah yang sangat besar terhadap upaya penurunan angka pengangguran di Tanah Air, di tengah adanya krisis ekonomi dunia yang belum akan berakhir.

**P**rogram penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas tenaga kerja banyak tersebar di berbagai kementerian. Namun tidak sedikit program yang digulirkan oleh kementerian itu

kandas di tengah jalan. Padahal dalam program tersebut ada yang dibiayai langsung melalui anggaran negara (APBN) maupun yang tidak.

Ditengarai, program-program tersebut ternyata

belum mampu menekan jumlah angka pengangguran yang masih cukup tinggi. Semestinya apabila program bidang ketenagakerjaan itu berjalan secara optimal maka hampir dipastikan akan terjadi penurunan angka pengangguran

secara signifikan. Untuk itu melalui rencana aksi nasional penciptaan lapangan kerja yang akan dilakukan dalam waktu dekat, diharapkan dapat lebih mempertajam program ketenagakerjaan pada setiap kementerian dan lembaga.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku kepala pemerintahan telah memberikan arahnya kepada Wakil Presiden Boediono untuk melakukan koordinasi kepada seluruh kementerian dan lembaga dalam hal penciptaan lapangan kerja.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Deputy Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, Bambang Widiyanto, langsung mengadakan pertemuan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk

melakukan pembahasan hal tersebut. Di antaranya dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Bappenas, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Pembahasan yang dilakukan dalam 3 kali pertemuan tersebut merupakan pengantar untuk mengumpulkan bahan yang akan dibawa dalam rapat koordinasi

antara wakil presiden dengan para menteri dan pimpinan lembaga terkait.

Rapat yang digagas oleh Deputy Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan itu, pada intinya membahas lembar kerja yang berjudul Kerangka Aksi Nasional Penciptaan Lapangan Kerja. Tujuannya adalah untuk menajamkan program-program penciptaan lapangan kerja yang ada di Kementerian dan Lembaga yang anggarannya khusus berasal dari APBN, tanpa mengubah alokasi anggaran, membuat program baru atau membentuk kelembagaan baru.

"Jadi ini diminta Pak Wapres untuk berkoordinasi bagaimana kita mempertajam program-program yang kita



PROGRES - IWAN IK

Deputy Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, Bambang Widiyanto memberikan arahan

klaim, yang di kementerian itu punya judul peningkatan kapasitas tenaga kerja dan juga penciptaan lapangan kerja," jelas Bambang Widianto mengawali pertemuannya.

Ada 5 pilar rencana aksi yang tercantum dalam lembar kerja itu sebagai hasil pengelompokan dari berbagai kementerian dan lembaga. *Pertama* adalah informasi dan layanan ketenagakerjaan, *kedua* peningkatan keterampilan dan kapasitas angkatan kerja, *ketiga* pengembangan UMKM dan kewirausahaan, *keempat* program padat karya dan infrastruktur, dan *kelima* program darurat penciptaan lapangan kerja.

Dari tiga kali pertemuan pembahasan, terungkap bahwa hampir seluruh kementerian dan lembaga memiliki program tentang ketenagakerjaan. Namun semuanya memiliki aturan yang beragam. Misalnya di Kementerian Koperasi dan UKM, memiliki program membangun mentalitas entrepreneurship di kalangan pelaku UMKM dan generasi muda.

Dari data yang tercatat di BPS bahwa per 2011 tercatat 55,21 juta unit usaha UMKM dengan jumlah tenaga kerja 104, 61 juta (Sumber BPS dan KemenUMKM 2011). Kemudian ada juga dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki program pengembangan ketrampilan di bidang pertekstilan. Lebih dari 7.000 orang yang sudah dilatih di bidang tersebut tersalurkan ke berbagai pusat industri pertekstilan di Jawa Tengah.

Begitu juga dengan kementerian-kementerian dan lembaga lainnya memiliki program-program tentang ketenagakerjaan. Tetapi seperti ditegaskan



Balai latihan kerja

Bambang Widianto bahwa yang akan dibahas dalam rapat koordinasi antara Wakil Presiden dan para Menteri nanti adalah program penciptaan lapangan kerja yang anggarannya bersumber dari APBN.

"Jadi tugas kita adalah menyiapkan paparan menteri yang akan dibahas dalam rapat

dengan Bapak Wakil Presiden nanti. Diskusi ini sifatnya terbuka, program apa yang akan dijalankan kementerian bapak akan tercermin dari apa yang akan dipaparkan nantinya oleh para menteri masing-masing", jelas Bambang Widianto di hadapan para pejabat eselon 1 dari berbagai kementerian itu. ■



Balai latihan kerja



## 5 PILAR RENCANA AKSI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

### 1. Informasi dan Layanan Ketenagakerjaan.

#### *Tujuannya*

- i. Untuk meningkatkan kualitas layanan fasilitas ketenagakerjaan.
- ii. Meningkatkan kualitas dan akses pada informasi pasar kerja.
- iii. Membangun sistem informasi kebutuhan dan permintaan keterampilan.

### 2. Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja

#### *Tujuannya*

- i. Untuk menyempurnakan standar kompetensi serta sertifikasi profesi agar sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja dengan melibatkan industri serta asosiasi profesi.
- ii. Memperkuat SMK (sekolah menengah kejuruan) untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja dan diserap oleh industri.
- iii. Memperkuat BLK untuk menjadi lembaga pelatihan berbasis kebutuhan industri.
- iv. Menciptakan insentif bagi individu untuk meningkatkan kapasitas SDM lewat pelatihan, dan insentif bagi lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas.

### 3. Penciptaan Lapangan Kerja melalui UMKM dan Kewirausahaan (Pengembangan UMKM)

#### *Tujuannya*

- i. Mengadakan program pelatihan wirausaha.
- ii. Mengadakan program layanan peningkatan usaha (Business Development Support/BDS), termasuk pelatihan teknis.
- iii. Memberikan dukungan bagi wirausaha pemula untuk mengakses KUR.

### 4. Penciptaan Lapangan Kerja melalui program-program padat karya dan infrastruktur sederhana (Program Padat Karya dan Infrastruktur)

#### *Tujuannya*

- i. Menciptakan lapangan kerja melalui infrastruktur sederhana.
- ii. Penyerapan angkatan kerja kelompok muda melalui program relawan.

### 5. Program Darurat Penciptaan Lapangan Kerja

#### *Tujuannya*

- i. Menciptakan lapangan kerja melalui program darurat.
- ii. Bantuan untuk dunia usaha dan pelatihan keterampilan.
- iii. Menunda kelompok muda untuk masuk ke pasar kerja.



Melamar kerja secara online di sebuah bursa lapangan kerja

## Menekan Jumlah Angka Pengangguran

Hingga Februari 2011 lalu BPS mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka secara nasional mencapai sekitar 6,80 persen. Namun di bulan yang sama tahun 2012, jumlah angka pengangguran mengalami penurunan menjadi sebesar 6,32 persen. Angka tersebut merupakan akumulasi dari jumlah pengangguran perkotaan dan perdesaan di seluruh Indonesia. Meski mengalami tren penurunan, pemerintah tetap melakukan upaya pengurangan jumlah pengangguran setiap tahunnya.

**S**eiring dengan meningkatnya jumlah lulusan pendidikan di jenjang sekolah menengah atas dan SMK, maupun perguruan tinggi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus berupaya melakukan berbagai langkah

terobosan untuk menekan jumlah angka pengangguran di Indonesia. Diantaranya adalah dengan membangun layanan bursa kerja secara *on-line*. Hal itu dilakukan untuk mendukung peningkatan pelayanan informasi pasar kerja.

Kemnakertrans membangun bursa kerja secara *on-line* itu akan terhubung di 416 kabupaten/kota, 33 Propinsi dan beberapa Bursa Kerja Khusus (BKK) di Satuan Pendidikan Tinggi serta Kejuruan yang terhubung dengan Pusat.



Diharapkan di tahun 2014 nanti penyedia bursa kerja online ini sudah bisa dimanfaatkan di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 520 kab/kota. Penyelenggaraan BKOL ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan perguruan tinggi di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Penyelenggaraan bursa kerja online di berbagai daerah ini bisa dimanfaatkan bagi para lulusan pendidikan SMK, lembaga latihan kerja ataupun lulusan perguruan tinggi untuk mempermudah mencari pekerjaan secara langsung.

"Pelaksanaan bursa kerja online yang memanfaatkan teknologi sangat dibutuhkan untuk mempertemukan secara langsung antara pencari kerja

lulusan pendidikan kejuruan maupun lulusan universitas yang sedang mencari pekerjaan dengan perusahaan atau pengguna tenaga kerja," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di Jakarta.

Bursa Kerja On-Line dibangun untuk menjembatani para pencari kerja dan pengguna tenaga kerja guna mempermudah proses rekrutmen, mulai dari tahap penyebaran informasi sampai tahap penerimaan tenaga kerja. Para pencari kerja dan perusahaan yang butuh pekerja pun bisa mengakses ke situs [www.infokerja.depnakertrans.go.id](http://www.infokerja.depnakertrans.go.id) untuk mencari daftar lowongan pekerjaan yang tersedia. Dalam Bursa Kerja On-Line ini dimaksudkan untuk memfasilitasi para pencari kerja dan pengguna tenaga kerja agar lebih mudah

mengetahui keberadaan masing-masing dan sekaligus memfasilitasi proses hubungan langsung antara pencari dan pemberi kerja.

"Dengan adanya pameran bursa kerja dan juga bursa kerja online diharapkan masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar tentang berbagai lowongan kerja yang tersedia. Sebaliknya bagi perusahaan bisa mendapatkan calon-calon pekerja yang berkualitas dan sesuai dengan fungsi jabatan yang dibutuhkan," jelas Muhaimin.

Selama ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mengadakan kerja sama dengan Dinas-dinas Tenaga Kerja tingkat Provinsi, Kabupaten/kota untuk menyiapkan BKOL bagi para pencari kerja di daerahnya masing-masing. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan



Bursa lapangan kerja



Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar

bursa kerja online memiliki nilai penting dan strategis untuk mempercepat penempatan tenaga kerja secara praktis, efisien dan efektif serta membantu pencari kerja untuk menemukan pekerjaan yang diinginkan.

"Tak hanya itu, Untuk mempermudah pencari kerja, Kemenakertrans mengadakan Bursa Kerja Khusus secara rutin di berbagai daerah di seluruh Indonesia dengan melibatkan dinas-dinas tenaga kerja, pengelola pendidikan kejuruan, universitas dan perusahaan-perusahaan swasta yang membutuhkan tenaga kerja baru," tambah Muhaimin.

Dijelaskan juga bahwa pihaknya merasa yakin penyelenggaraan bursa kerja online ini bakal mempercepat penempatan tenaga kerja dan meningkatkan prosentase dan jumlah lowongan kerja yang dapat terisi oleh para pencari kerja.

Dengan penyiapan tenaga kerja yang terampil dengan keahlian dan kompetensi kerja yang bisa diandalkan, diharapkan para lulusan sekolah kejuruan ini

bisa langsung bekerja sehingga mengurangi angka pengangguran di Indonesia yang jumlahnya mencapai 6,32 persen, kata Muhaimin.

### Sarjana Pendamping

Untuk mengurangi tingkat pengangguran di daerah, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga telah mengirimkan 1.300 orang Tenaga Kerja Sarjana (TKS) ke kawasan perkotaan dan pedesaan yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia.

Tugas utama dari para lulusan sarjana baru (fresh graduate) ini adalah melakukan pendampingan kepada para pencari kerja dan kelompok-kelompok usaha masyarakat binaan di bidang penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Jumlah TKS ditempatkan pada setiap provinsi, bervariasi antara 20 sampai 60 orang dan setiap TKS wajib membina 1-2 kelompok yang beranggotakan 10 orang. Sasaran pendampingan diprioritaskan bagi para pencari kerja usia muda serta masyarakat

di perkotaan dan pedesaan yang merupakan kantong TKI.

"Para sarjana itu bertugas untuk menggerakkan, melatih dan mendampingi masyarakat dan para pencari kerja dalam mencari dan menciptakan kesempatan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan di perkotaan dan pedesaan," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.

Menaker juga mengatakan pengiriman sarjana pendamping ke daerah perkotaan dan pedesaan itu dilandasi pertimbangan bahwa masih banyak penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan pedesaan yang perlu didampingi untuk mencari pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja baru. "Program Tenaga Kerja Sarjana atau sarjana pendamping ini bertujuan mendayagunakan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki para sarjana untuk melaksanakan program pemberdayaan yang langsung menyentuh masyarakat, katanya.

Sarjana pendamping yang diterjunkan ke masyarakat kelas menengah, merupakan lulusan perguruan tinggi yang belum memiliki pekerjaan tetap, namun berminat mengabdikan dirinya secara sukarela untuk membantu masyarakat. Mereka menjadi motivator, fasilitator, inovator, komunikator dan dinamisor bagi kelompok masyarakat yang didampinginya.

"Dalam melaksanakan tugasnya, para sarjana pendamping itu harus mampu mempersiapkan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan dan pengembangan usaha ekonomi produktif, padat karya, teknologi tepat guna dan kewirausahaan," katanya.



Kegiatan padat karya

Selain itu, para sarjana pendamping pun dapat melakukan tugasnya dengan menangani Bursa Kerja Online (BKOL), penyuluhan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan petugas pengantar/ perantara kerja bagi para pencari kerja usia muda.

Dalam pelaksanaan tugas, para sarjana yang memiliki latar belakang pendidikan yang beragam itu harus mampu mengidentifikasi potensi SDM dan SDA yang layak dikembangkan, selanjutnya mereka berinisiatif rencana program kerja sesuai dengan sasaran yang dituju.

Sebagai salah satu contohnya, para sarjana pendamping dapat pula menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan disesuaikan dengan minat, potensi masyarakat serta sumber daya alam yang tersedia di sekitar daerah tersebut. Jenis-jenis pelatihan wirausaha yang dilakukan meliputi budidaya ayam, sapi dan kambing, usaha konveksi, menjahit dan border serta pengolahan hasil pangan dan pertanian. Selain itu ada juga pelatihan tata rias pengantin, tata boga, bengkel motor, sablon dan percetakan, pengelasan, konstruksi skala kecil.

"Setelah berhasil mengarahkan, memberikan pelatihan wirausaha perseorangan maupun kelompok, para sarjana pendamping itu harus terus melakukan pembinaan melalui monitoring, evaluasi dan pengawasan agar usaha masyarakat itu dapat tetap bertahan," jelas Muhaimin.

Dikatakan juga bahwa penetapan lokasi pelaksanaan program sarjana pendamping ini harus memenuhi kriteria tertentu, diantaranya jumlah penganggur tinggi, mempunyai potensi alam yang layak untuk dikembangkan

dan adanya dukungan masyarakat dalam menerima inovasi untuk mengembangkan masyarakat mandiri.

"Yang menjadi sasaran pendampingan adalah kelompok masyarakat yang mempunyai minat dan motivasi tinggi untuk mengoptimalkan potensi diri dan sumber daya di lingkungannya, sehingga kedepannya mampu membentuk usaha mandiri baik perseorangan maupun berkelompok,"katanya.

Sasaran lainnya yang mendapat bimbingan dan pendampingan, tambah Muhaimin, adalah para pencari kerja yang berminat bekerja di sector formal baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan kesempatan yang ada.

Selama menjalankan tugasnya, para sarjana pendamping itu, berhak menerima tunjangan biaya hidup, menerima jaminan asuransi jaminan kesehatan selama penugasan dan menerima bantuan biaya operasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### Padat Karya

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012 ini juga menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 11. 264 orang melalui Program padat karya. Sasaran dari program tersebut adalah daerah yang memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi di Indonesia.

Program padat karya terbagi menjadi 2 kegiatan yaitu padat karya produktif dengan target penyerapan 8.184 orang dan padat karya infrastruktur sebanyak 3.080 orang

Menurut Menakertrans Muhaimin Iskandar, pelaksanaan Program padat karya ini bertujuan menyerap pengangguran di pedesaan, meningkatkan daya

beli dan membantu pertumbuhan ekonomi pedesaan di Indonesia. Dia juga menjelaskan bahwa dengan adanya program ini, maka akan tercipta pekerjaan sementara yang dapat menambah penghasilan masyarakat sekaligus terbangunnya sarana, prasarana dan usaha produktif masyarakat pedesaan.

"Pada dasarnya pemerintah hanya membantu memfasilitasi pelaksanaan padat karya ini. Semua berdasarkan usulan dan pertimbangan masyarakat setempat dengan memperhatikan potensi sumber daya alam yang tersedia," jelas Muhaimin.

Program padat karya ini berorientasi pada prinsip "Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat," dengan mengutamakan semangat gotong royong dan rasa solidaritas dari masyarakat di pedesaan yang berada di wilayah kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia. Untuk program padat karya infrastruktur difokuskan pada pembuatan dan rehabilitasi fisik seperti pembangunan dan pengerasan jalan di desa, pembangunan jembatan dan saluran air di pedesaan. Sedangkan program padat karya produktif, lebih pada pemberdayaan usaha seperti budidaya ikan, ternak sapi, kambing dan ayam dan kerajinan tangan anyaman. Dalam pelaksanaan dilapangan, program padat karya ini didampingi oleh petugas lapangan padat karya (PLPK) yang bertugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi padat karya ini.

Diharapkan dengan adanya program padat karya ini dapat mengurangi angka pengangguran di pedesaan dan memperluas kesempatan kerja baru sehingga mampu menambah lapangan kerja bagi tenaga kerja baru.



Padat karya pembangunan jalan

Sehingga pada tahun 2014 nanti jumlah angka pengangguran akan bisa turun menjadi 5,1 persen. Dengan menggalakkan program aksi gerakan penanggulangan pengangguran (GPP) di berbagai daerah di Indonesia, Menaker optimis bahwa target itu akan tercapai. Iw/db

# Meningkatkan Kualitas Pendidikan



**Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional. Salah satu caranya adalah dengan mencanangkan program wajib belajar 9 tahun melalui program BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Selanjutnya ada program PMU (Pendidikan Menengah Universal) untuk jenjang SMA dan SMK.**

**U**paya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 2003 yakni sejak dikeluarkannya Undang-undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 yang berisi tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Atas dasar undang-undang

itulah kemudian pada tahun 2005 dimulai program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Bantuan Operasional Sekolah atau yang biasa disebut BOS itu telah berjalan selama tujuh tahun. Banyak sudah perubahan yang dirasakan oleh sekolah maupun

masyarakat. Salah satunya adalah peningkatan prestasi belajar siswa. Hal itu dikatakan oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan, Musliar Kasim, pada acara dialog dengan Bank Dunia, di Jakarta (13/7).

Setelah sukses dengan program BOS yang memang diperuntukan bagi pendidikan dasar anak-anak usia 7 hingga 15 tahun itu, pemerintah kini mulai menggarap program bantuan pendidikan untuk jenjang berikutnya yakni SMA, SMK.

Program bantuan untuk SMA dan SMK itu dinamakan Pendidikan Menengah Universal (PMU). PMU diharapkan dapat meringankan beban orang tua siswa, seperti halnya BOS di jenjang pendidikan dasar.

"Harapan ke depan, harus



Ruang kelas Sekolah Dasar Negeri 2 Cihuni, Kelapadua, Kabupaten Tangerang, Banten



Siswa berangkat ke sekolah dengan transportasi perahu di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta

semakin banyak yang tamat SMA. Sekarang APKnya masih rendah. Dari seratus anak yang harusnya bersekolah di SMA, masih 25 anak yang tidak bersekolah," kata Musliar. Dijelaskan juga bahwa salah satu faktor angka putus sekolah tersebut adalah karena orang tua yang tidak mampu membiayai anaknya.

PMU diharapkan bisa mengikuti kesuksesan program BOS. Selain meningkatkan prestasi belajar siswa, BOS juga telah meningkatkan partisipasi sekolah dan masyarakat. "Sebelum ada dana BOS, sekolah tidak terima dana. Setelah ada BOS, sekolah bisa mengelola sendiri untuk apa saja BOS bisa digunakan," ungkap Wamendikbud Musliar.

Masyarakat juga bisa ikut mengawasi penggunaan dana BOS di lapangan. Sekolah juga diharapkan bisa memberikan laporan penggunaan BOS yang bisa diumumkan di majalah

dinding sekolah, atau tempat lain yang mudah dilihat masyarakat.

Selain itu program beasiswa juga akan ditingkatkan, mulai dari pendidikan dasar, hingga program S-3. "Makin banyak orang Indonesia yang terdidik, diharapkan kesejahteraan juga akan meningkat," jelas Musliar.

### Komitmen

Komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air juga dinyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-67 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, di Jakarta (16/8), presiden mengatakan bahwa anggaran pendidikan akan terus ditingkatkan agar reformasi terwujud.

Peningkatan anggaran juga memungkinkan terjadinya perluasan akses dan peningkatan

kualitas di seluruh jenjang pendidikan. Saat ini Indonesia telah menyelesaikan Program Wajib Belajar 9 Tahun. Program ini terus diupayakan secara bertahap ke dalam program Pendidikan Menengah Universal sebagai rintisan Program Wajib Belajar 12 Tahun.

"Kita ingin anak-anak bangsa di seluruh penjuru tanah air dapat mengenyam pendidikan dasar dan menengah secara lebih merata dan berkualitas," ujar Presiden.

Di samping perluasan akses ke jenjang pendidikan dasar dan menengah, Presiden mengatakan bahwa akses ke jenjang pendidikan tinggi juga terus diperluas. Pemerintah akan menyediakan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Beasiswa Bidikmisi bagi pelajar berprestasi dari keluarga tak mampu. Selain itu, pemerintah juga akan membangun Akademi Komunitas secara bertahap di

setiap kabupaten dan kota.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa cita-cita mulia mewujudkan Program Pendidikan Menengah 12 Tahun, harus dijalankan dengan memperhatikan kemampuan fiskal pemerintah pusat dan daerah. "Pemerintah Daerah Provinsi, perlu mengambil peran lebih besar dalam mendukung pembiayaan program ini," kata Presiden.

Pemerintah juga berkomitmen memerhatikan nasib para tenaga pendidik. Menurut Presiden, keberhasilan program pendidikan, baik pendidikan dasar maupun menengah, sangat ditentukan oleh ketersediaan guru dalam jumlah, distribusi, dan kompetensi yang sesuai. Sejalan dengan upaya meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru, pemerintah menjalankan kebijakan yang

bertujuan meningkatkan kualitas guru. "Dengan cara itulah, terdapat korelasi positif antara peningkatan kesejahteraan dengan peningkatan kinerjanya," ujar Presiden.

Presiden mengatakan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Presiden mengajak seluruh Bangsa Indonesia agar tetap optimis, dalam sepuluh atau dua puluh tahun ke depan, anak-anak bangsa siap menyambut 'Indonesia Emas'.

### Anggaran Pendidikan

Untuk tahun 2013 pemerintah akan mengalokasikan anggaran pendidikan sebanyak Rp 331,8 triliun. Alokasi anggaran tersebut naik sebanyak 6,7 persen dibandingkan alokasi tahun ini sebanyak Rp310,8 triliun. Sebelumnya pada 2011, anggaran

pendidikan mencapai Rp266,9 triliun, kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraannya di Jakarta, Kamis (16/08/2012).

Dari alokasi anggaran pendidikan tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mendapatkan alokasi anggaran sebanyak Rp 66 triliun. "Alhamdulillah dalam RAPBN 2013 mendatang kita tetap dapat memenuhi konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN," jelas Presiden.

Ditekankan juga bahwa anggaran pendidikan yang makin besar itu harus digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan pemerataan pendidikan. Selain itu, untuk meningkatkan



Sejumlah siswa Sekolah Dasar belajar mengoperasikan internet di SD Bronggang Baru, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta





Dialog siswa-siswi SDN 02 Taradam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumbar

partisipasi pendidikan di semua jenjang pendidikan. "Alokasi anggaran pendidikan tetap kita prioritaskan untuk melanjutkan pemberian bantuan operasional sekolah atau BOS bagi 45 juta siswa setingkat sd/madrasah ibtdaiyah/salafiyah ula dan SMP/madrasah tsanawiyah/salafiyah wustha," katanya.

#### Empat Hal Pokok Pendidikan

Sebelumnya, dalam rapat kabinet terbatas bidang pendidikan yang dilangsungkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta (31/7), Menteri Mohammad Nuh telah melaporkan empat hal pokok pendidikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Usai rapat, Presiden SBY kemudian menjelaskan empat hal tersebut. Pertama, ketersediaan dan keterjangkauan mengakses

pendidikan. Kedua, mutu dan relevansi pendidikan. Ketiga, pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Keempat, tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Tentang ketersediaan dan keterjangkauan dalam akses pendidikan, Presiden SBY menjelaskan bahwa telah menerima laporan perkembangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS telah dimanfaatkan dengan baik, dengan jumlah yang tepat serta dapat meringankan mereka yang tidak mampu. "Ada kenaikan angka. Untuk Sekolah Dasar dari Rp397 ribu menjadi Rp580 ribu. Sedangkan untuk SMP dari Rp570 ribu menjadi Rp710 ribu. Harapan kita, kenaikan angka BOS bisa meng-cover kekurangan pendidikan di daerah," ujar Presiden.

Presiden juga menerima

laporan tentang perkembangan rehabilitasi gedung sekolah. Gedung sekolah serta ruang kelas yang mendapat prioritas rehabilitasi adalah yang dalam kondisi rusak berat dan rusak sedang. Presiden berpesan kepada Mendikbud agar rehabilitasi gedung sekolah bisa rampung pada 2014.

"Untuk itu harus terus dilakukan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," tuturnya.

Adapun di bidang kebudayaan, Presiden SBY menggarisbawahi pengembangan kebudayaan. Presiden berharap, ada kesatuan antara dunia pendidikan dengan kebudayaan. "Jadi anak tidak hanya cerdas dan intelek, tapi punya karakter baik, unggul dan mulia dalam rangka menyiapkan human capital," ucap Presiden.

■ Iw/Kemendikbud



Beras raskin

## Menurunkan Angka Kemiskinan lewat Raskin

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2012 kemarin menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,53 persen atau berkurang sekitar 890.000 jiwa.

**D**alam rilisnya yang dikeluarkan pada awal Juli kemarin, BPS menjelaskan bahwa penduduk miskin di Indonesia saat ini (Maret 2012) berjumlah 29,13 juta jiwa (11,96 persen), atau mengalami penurunan sebesar

0,53 persen dibanding tahun lalu di bulan yang sama (Maret 2011), yang mencapai 30,02 juta jiwa (12,49 persen). Rinciannya adalah jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebanyak 399,5 ribu orang dan jumlah penduduk miskin di perdesaan turun 487

ribu orang.

Meski penurunan itu agak meleset dari yang ditetapkan sebesar 1 % per tahun. Namun ada beberapa faktor yang menarik dari penyebab turunnya jumlah masyarakat miskin itu, salah satunya adalah dikarenakan

lancarnya penyaluran subsidi beras raskin untuk masyarakat miskin.

### Tepat Sasaran

Tentang Raskin tersebut dijelaskan oleh BPS bahwa penerima raskin (Januari - Maret 2012) pada kelompok 20 persen penduduk dengan pendapatan terendah di perkotaan meningkat menjadi 17,2 persen di tahun 2012 dari sebelumnya sebesar 13,3 persen tahun 2011. Begitu juga di pedesaan mengalami peningkatan serupa. Hal tersebut berdasarkan pada data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2011 dan Susenas 2012.

Jadi intinya, penyaluran raskin yang semakin tepat sasaran dapat menurunkan jumlah masyarakat miskin, walaupun sebenarnya masih ada sekitar 6 faktor lagi yang memengaruhi angka tersebut.

Namun demikian, lancarnya penyaluran raskin tersebut tak terlepas dari penggunaan data yang ada.

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kesra penyaluran raskin untuk 5 bulan pertama (Januari s/d Mei 2012), penerima manfaat dengan menggunakan data PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) 2008. Sedangkan untuk 7 bulan berikutnya (Juni s/d Desember 2012), penerima manfaat menggunakan data Basis Data Terpadu (BDT) TNP2K yang bersumber dari PPLS 2011.

Untuk itu Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat, Adang Setiana yang juga Deputi Menko Kesra Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, pada Mei 2012 lalu telah melakukan penandatanganan kesepakatan penggunaan data Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 untuk

pelaksanaan program Raskin 2012 dengan TNP2K selaku penyedia data. Hal itu bertujuan agar penyaluran beras untuk rumah tangga miskin bisa lebih tepat sasaran.

Kerentanan harga beras terhadap kemiskinan membuat raskin sangat berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan. Menurut Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widiyanto bobot beras mencapai 30% dalam mempengaruhi garis kemiskinan. Sedikit saja ada kenaikan harga beras maka jumlah orang miskin bertambah.

Dengan adanya data terbaru tersebut diharapkan sistem penyaluran bantuan raskin kepada masyarakat miskin dapat lebih sempurna. Penyempurnaan itu akan dilakukan secara gradual atau bertahap. Tahap pertama adalah memastikan bahwa data yang akan digunakan oleh bupati





dan walikota itu berasal dari data Basis Data Terpadu (BDT) TNP2K.

Karena selama ini para bupati dan walikota itu menggunakan data dari BPS tingkat Kabupaten/Kota. Maka untuk sekarang dan seterusnya semuanya harus menggunakan data dari TNP2K hasil PPLS 2011 itu. Kemenko Kesra nanti akan menyampaikan data penyaluran raskin tersebut ke seluruh provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia melalui PT Pos Indonesia.

Sedangkan tahap berikutnya akan dicoba melalui pemberian kartu raskin kepada 1,3 juta rumah tangga miskin. Kartu itu akan dikirimkan melalui PT Pos kepada rumah tangga sasaran. Dengan menunjukkan kartu kepada petugas penyalur raskin, masyarakat penerima bantuan tersebut dapat langsung menerima raskin yang memang menjadi haknya.

Berdasarkan UU No.22 Tahun 2011, pemerintah telah menetapkan subsidi Raskin 2012 kepada sekitar 17,48 juta RTS yang tersebar di seluruh Indonesia. Semuanya sudah terdaftar secara *by name by address* dalam Basis Data Terpadu TNP2K PPLS 2011.

Jumlah tersebut tidak saja berasal dari masyarakat miskin tetapi juga termasuk masyarakat yang hampir miskin atau mendekati miskin.

Jumlah subsidi beras untuk warga miskin itu sebesar 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp.1.600,-/kg di titik distribusi. Dan Perum

Bulog adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pendistribusi raskin tersebut. Ada enam indikator (6T) untuk melihat sejauh mana keberhasilan penyaluran raskin, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat kualitas.

Untuk mencapai hal itu maka Kementerian Koordinator Bidang Kesra selaku penanggung jawab penyaluran raskin kepada masyarakat miskin, telah menyusun pedoman umum (pedum) penyaluran raskin. Pedum tersebut merupakan panduan bagi pelaksanaan raskin untuk mencapai 6 Tepat (6T) tersebut. Pedum ini juga mengakomodasi inisiatif dan kebijakan operasional lokal yang bertujuan memperlancar pelaksanaan distribusi Raskin di daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan keterbatasan masing-



## PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN

Untuk melaksanakan penyaluran di lapangan telah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan di tingkat Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) di tingkat Kabupaten/Kota.

### Penyediaan Beras

Perum BULOG berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan Inpres Perberasan yang berlaku.

### Rencana Penyaluran

Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota menyusun rencana penyaluran yang meliputi waktu, jumlah dan jadwal pendistribusian untuk mengatasi kendala geografis, infrastruktur dan sarana transportasi, perkembangan harga serta kebutuhan beras RTS-PM.

Penyediaan beras di setiap gudang Perum BULOG disesuaikan dengan rencana penyaluran Raskin di wilayah kerjanya, sehingga kelancaran proses penyaluran Raskin dapat terjamin.

### Pola Penyaluran Raskin

Penyaluran Raskin dapat dilakukan secara reguler melalui kelompok kerja (Pokja) atau dengan cara lain melalui:

1. Warung Desa (Wardes);
2. Kelompok Masyarakat (Pokmas);
3. Padat Karya Raskin.

Pembentukan Wardes dan Pokmas mengacu pada pedoman khusus yang telah disusun, sedangkan Padat Karya Raskin akan diatur kemudian.

### Pendistribusian

- a. Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota/Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada Kadivir/Kasubdivir/ KaKansilog Perum BULOG berdasarkan pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- b. Berdasarkan SPA, Kadivir/Kasubdivir/KaKansilog Perum BULO G menerbitkan SPPB/DO (Surat Perintah Penyerahan Barang / Delivery Order) beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan kepada Satker Raskin.
- c. Kepala Gudang melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin sebelum keluar dari gudang dan diserahkan kepada satker Raskin.
- d. Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum BULOG dan menyerahkannya kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Titik Distribusi (TD).
- e. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin yang diserahkan oleh Satker di TD.
- f. Apabila terdapat Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan dalam Inpres Perberasan, maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi atau Penerima Manfaat harus menolak dan mengembalikannya kepada Satker Raskin untuk diganti dengan kualitas yang sesuai.
- g. Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebanyak 15 kg/ RTS/bulan dan dicatat dalam formulir DPM-2. Selanjutnya DPM-2 dilaporkan kepada Tim Raskin Kecamatan.
- h. Apabila di Titik Bagi (TB) jumlah RTS melebihi data RTS-PM hasil PPLS-11 BPS, maka Pokja Raskin tidak diperkenankan untuk membagi Raskin kepada rumah tangga yang tidak terdaftar dalam DPM-1.
- i. Pemerintah Kabupaten/Kota harus mendistribusikan Raskin dari TD ke TB sampai ke RTS-PM.
- j. Apabila diperlukan, Kepala Desa/Lurah dapat mengikutsertakan RT/RW dalam pendistribusian Raskin dari TD sampai ke RTS-PM.
- k. Apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak terdistribusikan kepada RTS-PM, maka harus dikembalikan ke Perum BULOG untuk dikoreksi administrasi penyalurannya.



#### Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB)

- Pembayaran HPB Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp1.600,00/kg.
- Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung disetor ke rekening HPB BULOG melalui bank setempat oleh Pelaksana Distribusi yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis sesuai dengan kondisi setempat atau dapat diserahkan kepada Satker Raskin yang kemudian langsung disetor ke rekening HPB BULOG.
- Atas pembayaran HPB Raskin tersebut, dibuatkan Tanda Terima Hasil Penjualan Raskin (TT-HP Raskin) rangkap 3 (tiga) oleh Satker Raskin. HPB Raskin yang disetor ke bank oleh Pelaksana Distribusi Raskin harus disertai bukti setor asli. TT-HP Raskin diberikan kepada Pelaksana Distribusi Raskin setelah dilakukan konfirmasi ke bank yang bersangkutan.
- Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB BULOG di bank.
- Apabila Pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan melaporkan kepada penegak hukum. Untuk kelancaran penyaluran Raskin selanjutnya, maka Kepala Desa/Lurah menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Raskin.
- Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan harus membantu kelancaran pembayaran HPB Raskin, atau dapat memberikan dana talangan bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar tunai.

#### Catatan:

Kadivreg : Kepala Divisi Regional

Kasubdivreg : Kepala Divisi Sub Divisi Regional

Kakansilog : Kepala Kantor Seksi Logistik

DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/Kelurahan.

DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan

## Informasi dan Sosialisasi Program Raskin Juni-Desember 2012

### Apa itu Program Raskin?

- Program Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin).
- Program Raskin adalah program nasional lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas Kementerian/Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan Program Raskin.

### Apa tujuan Program Raskin?

- Program Raskin bertujuan untuk mengurangi sebagian beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

### Siapa yang berhak menerima beras Raskin?

- Rumah tangga yang dapat menerima beras Raskin, atau juga disebut Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin adalah rumah tangga yang terdapat dalam Daftar Nama dan Alamat RTS-PM Program Raskin Juni – Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (Kemkeno Kesra) dengan surat nomor B-1128/KMK/DEP.II/V/2012 tanggal 22 Mei 2012.
- Tahun 2012, Program Raskin menyediakan beras bersubsidi kepada 17.488.007 RTS-PM dengan kondisi sosial ekonomi terendah di Indonesia (kelompok miskin dan rentan miskin).

### Bagaimana daftar Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin ditetapkan?

- Penetapan RTS-PM Program Raskin 2012 didasarkan pada Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial.
- Basis Data Terpadu berisikan sekitar 25 juta rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah dirinci menurut nama dan alamat. Sumber utama Basis Data Terpadu adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS 2011) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diserahkan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- Semua rumah tangga yang masuk dalam Basis Data Terpadu diperingkat berdasarkan status kesejahteraannya dengan menggunakan metode indeks kesejahteraan yang obyektif dan spesifik untuk setiap kabupaten/kota.
- Sesuai dengan pagu nasional Raskin, TNP2K mengidentifikasi sekitar 17,5 juta rumah tangga yang paling rendah tingkat kesejahteraannya dari Basis Data Terpadu. Dengan demikian mereka yang didata pada PPLS 2011 tidak serta merta menjadi RTS-PM.
- Pagu Raskin per provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan mengacu pada sebaran jumlah RTS-PM yang termasuk dalam 17,5 juta rumah tangga yang paling rendah tingkat kesejahteraannya dari Basis Data Terpadu sebagaimana dijelaskan di atas.
- TNP2K menyerahkan data pagu daerah beserta nama dan alamat RTS-PM Raskin Juni-Desember 2012 kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.
- Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat menetapkan pagu Raskin provinsi dan jumlah RTS kabupaten/kota berdasarkan data dari TNP2K dengan surat Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat nomor B-910/KMK/DEP.II/IV/2012.

### Mengapa pagu Raskin Juni-Desember 2012 di beberapa daerah berbeda dengan pagu sebelumnya?

- Pagu Raskin Juni-Desember 2012 di beberapa daerah yang telah ditetapkan dapat berbeda (lebih kecil atau lebih besar) dengan pagu sebelumnya karena pagu Raskin Juni-Desember 2012 didasarkan pada hasil PPLS 2011 yang merupakan pemutakhiran dari hasil PPLS 2008 yang menjadi dasar penentuan pagu sebelumnya.
- Pagu Raskin Juni-Desember 2012 menunjukkan perubahan kondisi karakteristik rumah-tangga yang berbeda dari data PPLS 2008 dan PPLS 2011.
- Faktor lain yang juga dapat menyebabkan perbedaan pagu antara lain pemekaran wilayah, perubahan tingkat kemiskinan, dinamika perekonomian daerah, atau perubahan jumlah penduduk (misal: migrasi, lahir, mati).



#### Apakah memungkinkan mengganti RTS-PM yang sudah terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat/DPM?

- Mungkin, apabila RTS-PM yang terdapat dalam Daftar Nama dan Alamat RTS Program Raskin Juni – Desember 2012 (atau selanjutnya disebut Daftar Penerima Manfaat/DPM):
  - Pindah alamat ke luar desa/kelurahan,
  - Meninggal (seluruh anggota rumah tangga sudah meninggal),
  - Tercatat lebih dari satu kali (duplikasi rumah tangga), atau
  - Kaya.
- Penentuan dan penetapan RTS-PM pengganti tersebut dilakukan melalui musyawarah desa/kelurahan.
- Perubahan/penggantian yang diputuskan musyawarah desa/kelurahan tersebut tidak diperkenankan mengubah jumlah RTS-PM di desa/kelurahan tersebut.
- Rumah tangga pengganti RTS-PM diprioritaskan bagi rumah tangga yang memiliki jumlah anggota rumah tangga lebih besar (terdiri dari balita dan anak usia sekolah, dan/atau kepala rumah tangganya orang lanjut usia), kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya kurang layak huni, dan/atau berpenghasilan lebih rendah dan tidak tetap.
- Mengenai perubahan tersebut, Kepala Desa/Lurah mencatat data RTS-PM yang pindah, meninggal (seluruh anggota RTS-PM meninggal), tercatat lebih dari satu kali (duplikasi RTS-PM), atau RTS-PM kaya dan mencatat rumah tangga penggantinya dalam Formulir Rekap Pengganti (FRP). Kepala Desa/Lurah menyampaikan FRP yang sudah diisi kepada Camat (melalui Tim Koordinasi Raskin tingkat kecamatan) selaku penanggung jawab pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya. FRP yang telah diisi disampaikan selambat-lambatnya akhir Agustus 2012. Petugas PT. Pos Indonesia akan mengambil FRP yang telah terkumpul di kecamatan dan mengirimkannya kepada Kemendagri sebagai Unit Pengaduan Masyarakat dalam Tim Koordinasi Raskin Pusat.

#### Berapa jumlah beras Raskin yang dapat diperoleh RTS-PM?

- RTS-PM Raskin berhak untuk menerima beras Raskin sebanyak 15 kg per RTS-PM per bulan selama bulan Juni-Desember 2012.

#### Berapa harga tebus beras Raskin?

- Harga tebus beras Raskin adalah Rp 1.600 per kg di Titik Distribusi (TD).

#### Bagaimana RTS-PM dapat menebus dan mengambil beras Raskin?

- Beras Raskin disalurkan oleh Perum BULOG ke Titik Distribusi (TD) yaitu lokasi yang ditentukan dan disepakati oleh Perum BULOG dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab mendistribusikan Raskin dari TD ke Titik Bagi (TB) yaitu lokasi tempat penyerahan beras Raskin kepada para RTS-PM, untuk selanjutnya dibagikan kepada RTS-PM Raskin.


#### Bagaimana memastikan RTS-PM mendapatkan haknya sebanyak 15 kg beras Raskin per bulan?

- Tim Koordinasi Raskin Pusat telah mencetak daftar nama dan alamat RTS-PM dan mengirimkan ke setiap desa/kelurahan untuk ditempelkan di kantor desa/kelurahan. Dengan cara ini, RTS-PM dan masyarakat umum dapat mengetahui rumah tangga mana saja di desa/kelurahan tersebut yang berhak menerima beras Raskin.
- Tim Koordinasi Raskin Pusat juga telah mencetak poster berisi informasi tentang Program Raskin untuk ditempelkan di kantor desa/kelurahan supaya informasi Program Raskin dapat diketahui oleh masyarakat umum.
- Pada waktu penyerahan Raskin kepada RTS-PM, dibuatkan tanda terima beras Raskin oleh Pelaksana Distribusi Raskin.

#### Ke mana masyarakat dapat bertanya untuk memperoleh informasi tentang Program Raskin?

- Pertanyaan mengenai Program Raskin dan pelaksanaannya dapat disampaikan kepada Sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Program Raskin yang berada di bawah koordinasi Badan /Kantor Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi (sesuai Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2012). \*\*\*





Nasional

# Menuju Swasembada Pangan 2014

Kebergantungan Indonesia terhadap produk impor saat ini begitu tinggi, terutama impor pangan. Misalnya beras, jagung, kacang-kacangan, daging sapi, gula, terigu juga kedelai. Bahkan saat ini singkong dan garam pun ikut menjadi barang impor.

**M**eski terkenal sebagai negara agraris, Indonesia saat ini ternyata sangat menggantungkan kebutuhan pokok pangannya dari kekuatan impor. Tidak saja beras yang menjadi makanan pokok sebagian besar masyarakat tetapi juga kedelai. Untuk itu Indonesia perlu segera melakukan perubahan dalam sistem pembangunan bidang pertanian agar tidak terus menerus menjadi negara pengimpor pangan. Terutama untuk lima komoditas pokok pangan.

Menteri Pertanian Suswono telah menjelaskan bahwa kementeriaannya telah membuat road map percepatan swasembada lima komoditas pangan pokok yakni beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi dan berharap road map bisa digunakan sebagai dokumen acuan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan swasembada pangan.

Bahkan, pemerintah juga telah menargetkan bahwa pada tahun 2014 akan mencapai swasembada pangan. Diharapkan pada saatnya jumlah target produksi padi bisa mencapai 75,70 juta ton, untuk produksi jagung sebesar 29 juta ton, kedelai se besar 2,7 juta ton serta produksi gula sebesar 4,81 juta ton sedangkan untuk daging sapi sebesar 0,55 juta ton.

Dilihat dari fakta yang ada, keinginan itu tidaklah berlebihan. Hanya saja perlu dukungan kuat dari pemerintah daerah yang memiliki banyak lahan untuk pengembangan produk-produk pertanian agar rencana swasembada pangan ini tercapai.

### Arahan Wapres

Dalam Rapat Pleno Konferensi Ketahanan Pangan 2012 di Jakarta,



**KETAHANAN PANGAN.** Wapres Boediono (kiri) menyerahkan piagam penghargaan program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) kepada masing-masing Gubernur Jateng Bibit Waluyo (tengah) dan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (kanan) di acara Konferensi Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2012 di Jakarta, Rabu (18/7). Konferensi tersebut mengambil tema "Percepatan Pencapaian Swasembada Lima Komoditas Pangan Pokok".

Juli lalu, Wakil Presiden Boediono telah menerima rumusan hasil rapat Gubernur Dewan Ketahanan Pangan dari Gubernur Banten Atut Choisyiyah. Wapres berpesan agar rumusan para Gubernur dan hasil rapat pleno harus benar-benar dijabarkan secara operasional

dilaksanakan, dimonitor, dan kalau perlu disesuaikan dengan perubahan situasi lapangan.

"Dari hasil-hasil Sidang Dewan Ketahanan Pangan sebelumnya saya mencatat masih perlu ditingkatkan segi implementasi dari apa-apa yang



diputuskan. Dalam kaitan dengan implementasi ini, saya meminta agar hasil-hasil konferensi DKP kali ini benar - benar diimplementasikan dengan lebih baik lagi. Secara khusus saya minta agar dilakukan review semua regulasi yang terkait dengan pangan dan kemudian diambil langkah-langkah untuk meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah," kata Wapres.

Pada kesempatan itu Wakil Presiden mengingatkan bahwa tujuan pokok ketahanan pangan nasional adalah tersedianya bahan pangan pokok yang cukup dengan harga terjangkau bagi seluruh rakyat, sepanjang waktu. Untuk mencapai ketahanan pangan

nasional itu, strategi utamanya bertumpu pada kemandirian suplai untuk memenuhi secara berkelanjutan perkembangan konsumsi. "Kemandirian suplai yang sustainable atau berkelanjutan dalam jangka panjang hanya bisa dicapai melalui satu jalan: peningkatan produktivitas per satuan lahan, melalui penerapan teknologi," kata Wapres.

Dalam arahnya, Wapres Boediono menyinggung tentang kecemasan dunia akan keamanan sektor pangan. Dalam lima tahun terakhir, kata Wapres, dunia mengalami tiga krisis pangan. Yang pertama terjadi pada 2007/2008 ketika badai El Nino menyebabkan kekeringan dan gagal panen di Argentina

dan Australia yang kemudian disusul dengan krisis ekonomi dan politik; pada 2010 dunia menyaksikan kekeringan di Rusia; kedua krisis itu menyebabkan harga gandum meroket dan kini pada 2012, Amerika Utara mengalami kekeringan dan harga kedelai mulai melonjak seiring dengan harga jagung yang mulai merambat naik. "Dalam suasana pangan global yang rawan shock akibat perubahan iklim, kebijakan ketahanan pangan kita harus makin kita perkuat. Tidak ada ruang untuk bersantai," kata Wapres.

Untuk memperoleh pola konsumsi yang rasional dan berkelanjutan, kata Wapres, perlu adanya program diversifikasi pangan, kebijakan harga dan

insentif yang rasional, sehingga perkembangan pola konsumsi masyarakat dalam jangka panjang tidak melenceng dari kapasitas pangan nasional dan dapat dipenuhi dengan sumber daya yang tersedia di tanah air.

Dalam kondisi perubahan iklim yang penuh kerawanan dan suasana global yang penuh ketidakpastian, kata Wapres, sistem pangan nasional harus bisa menjamin keseimbangan jangka panjang antara produksi dan konsumsi sekaligus juga harus mampu meredam dampak dari setiap gejolak yang timbul dalam jangka pendek. Oleh karena itu selain kebijakan produksi dan kebijakan konsumsi tersebut, Indonesia harus memiliki dua instrumen yang dapat diandalkan, yaitu: (a) kebijakan stok yang benar-benar efektif dan (b) kebijakan ekspor-impor pangan yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan perimbangan supply dan demand pangan dalam negeri dalam jangka pendek.

Maka, Wapres mengulangi, ada tiga komponen kebijakan pokok yang harus menyatu dan saling mendukung dalam strategi ketahanan pangan, yaitu :

- (a) Peningkatan produktivitas melalui teknologi
- (b) Pengembangan pola konsumsi yang sesuai dengan kapasitas produksi pangan nasional melalui program diversifikasi pangan.
- (c) Kebijakan stok dan ekspor-impor pangan yang mampu mengatasi gejolak jangka pendek.

Selanjutnya, Wapres menggarisbawahi sembilan langkah kebijakan yang perlu mendapat perhatian dan komitmen pemerintah pusat dan daerah, yakni:

- (1) Pemerintah Daerah agar

meningkatkan komitmennya terhadap pencapaian target swasembada di daerah masing-masing melalui koordinasi program yang lebih baik dan dukungan dana APBD yang cukup.

- (2) BUMN/BUMD juga harus mengambil peran yang lebih besar lagi dalam program-program swasembada pangan termasuk mendukung permodalan.

- (3) W a p r e s m e m i n t a kementerian dan lembaga terkait menyusun langkah - langkah khusus untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi melalui upgrading lembaga-lembaga riset yang ada termasuk di bidang bioteknologi pertanian pangan dan mempercepat laju diseminasi dan adopsi hasil-hasil riset tersebut di kalangan petani.

"Dalam kaitan ini saya minta dikaji cermat imbalan yang tepat antara alokasi anggaran untuk subsidi dan alokasi anggaran untuk mendukung program peningkatan produktivitas melalui teknologi dalam APBN dan APBD," kata Wapres.

- (4) Perlu disusun dan dilaksanakan program bersama komprehensif antara Pemerintah -Swasta untuk meningkatkan jumlah dan mutu SDM di daerah di bidang pertanian dan industri pendukungnya, mulai dari SDM Pemulia, Budidaya, Teknologi Pertanian, Teknologi Pangan hingga Kewirausahaan.

- (5) Perlu disusun dan dilaksanakan program yang terpadu dan sistematis untuk meningkatkan kapasitas seluruh mata rantai industri

pertanian mulai dari hulu hingga hilir, yang mencakup industri benih, pupuk, pakan, pestisida dan alsintan.

- (6) Sistem informasi produksi dan sistem informasi pasar yang ada perlu diefektifkan dan ditingkatkan kualitasnya sehingga makin bermanfaat nyata bagi produsen maupun konsumen yang melaksanakan transaksi sehari-hari.

- (7) Alih fungsi lahan pertanian produktif di semua daerah perlu benar-benar dikendalikan dengan menerapkan secara tegas ketentuan-ketentuan yang berlaku.

- (8) Perlu diadakan review menyeluruh atas sistem stabilisasi harga pangan pokok yang ada, agar makin responsif terhadap perubahan kondisi supply dan demand yang sering mendadak dan tidak dapat diantisipasi sehingga dapat selalu dijaga kestabilan harga di dalam negeri, termasuk harga produsen yang wajar dan harga konsumen yang terjangkau. Kebijakan stok dan kebijakan ekspor-impor harus saling mendukung untuk mengawal stabilitas harga dalam negeri.

- (9) Perlu dirumuskan sistem insentif yang pas dan sustainable untuk mendukung : Program-program intensifikasi dan ekstensifikasi pangan yang dilaksanakan oleh swasta, pengembangan industri hilir berbasis sumber daya pangan lokal untuk mendukung diversifikasi pangan dan pengembangan sentra-sentra produksi pangan baru, seperti di wilayah Timur Indonesia.



## 2014, Puncak Swasembada Pangan Berkelanjutan

Arus globalisasi saat ini telah menghadapi sistem pangan nasional pada persaingan pasar yang semakin ketat. Berbagai produk pangan impor dengan kualitas dan harga yang lebih baik, berpotensi menekan kemampuan produksi pangan nasional. Persaingan ini terkadang tidak adil bagi pelaku usaha nasional karena banyak negara pesaing yang memberikan proteksi dan subsidi dalam jumlah yang cukup besar kepada produk dan petaninya. Untuk memenangkan persaingan ini tentunya diperlukan kemampuan teknis dan manajemen dalam pengelolaan produksi serta mengangkat daya saing tinggi terhadap produk pangan nasional yang sebagian besar dihasilkan para petani di pedesaan.

Oleh: Oktavio Nugrayasa,  
Kabid Ketahanan Pangan dan PDT/ setkab.go.id

**T**antangan kedepan adalah kemampuan merancang kebijakan perdagangan yang dapat melindungi sistem produksi domestik, serta dapat menunjang peningkatan daya saing bagi produk pangan lokal tanpa menyebabkan distorsi yang berlebihan terhadap mekanisme pasar di dalam negeri.

Telah cukup banyak berbagai pandangan dan analisis terkait ancaman membanjirnya produk impor pangan ke Indonesia, terutama menyoroti pilihan-pilihan atas kebijakan pemerintah dalam rangka mengurangi ketergantungan produk pangan impor serta meningkatkan produk pangan domestik.

Berdasarkan data dari *berita-satu.com*, saat ini ketergantungan Indonesia atas produk pangan impor, antara lain sebesar 100% untuk impor gandum, 60% untuk kedelai, 70% susu, 54% kebutuhan gula, dan sekitar 30% kebutuhan daging sapi dalam rangka mencukupi permintaan dalam negeri, dimana produk pangan tersebut sebagian besar dikirim dari negara-negara penghasil terbesar di dunia. Berdasarkan persentase, khusus

untuk kebutuhan impor jagung dan beras tidak terlalu besar, yakni hanya 11% (2 juta ton impor) dari 18 juta ton produksi jagung nasional serta sebesar 5% (2 juta ton impor) dari 39 juta ton produksi beras nasional.

Hal yang lebih krusial bagi ekonomi pangan nasional adalah kinerja produksi pangan domestik perkembangannya masih belum optimal. Apalagi pemerintah akan mencapai target besar menuju swasembada pada tahun 2014 untuk 5 (lima) komoditas pangan strategis, yaitu beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi.



### Produk Beras

Berdasarkan publikasi terakhir *bps.go.id* soal angka ramalan produksi pada Juli 2012, target swasembada beras mungkin relatif paling aman walaupun untuk memenuhi surplus sampai 10 juta ton tahun 2014 perlu kerja keras dan komitmen yang tinggi dari seluruh pemimpin/stakeholder yang terkait di bidang perberasan guna mewujudkan harapan tersebut dari waktu tersisa selama 2 tahun ke depan.

Hambatan sedikit sulit, untuk menghentikan kegiatan laju konversi lahan sawah subur menjadi kegunaan lain, diantaranya alih fungsi lahan produktif menjadi lahan perumahan dan industri. Juga kesukaran dalam mengejar perbaikan sebesar 50% atas sistem infrastruktur irigasi yang

telah rusak dan adapula beberapa saluran irigasi diberbagai daerah sentra produksi beras keadaannya rusak cukup berat.



### Produk Jagung

Untuk target swasembada jagung mungkin masih dapat tercapai asalkan semua kebijakan terkait pemberian insentif peningkatan produksi dan produktivitas benar-benar dilaksanakan secara baik dan konsisten, di mulai dari ketersediaan benih unggul (hibrida), penyediaan pupuk yang tepat waktu, hingga kegiatan penanganan yang terpadu hama penyakit tanaman serta berpihaknya sistem usaha tani kepada Petani jagung dibarengi upaya penguatan kelembagaan pemasaran dan penanganan produksi pascapanen yang umumnya berhubungan dengan industri pakan ternak.

### Produk Gula Pasir

Target swasembada gula sebesar 4,2 juta ton diharapkan akan tercapai tahun 2014, meskipun masih terdapat berbagai persoalan di kelembagaan yang melingkupinya mulai dari tingkat usaha tani di hulu, perdagangan



dan distribusi di tengah, sampai struktur pasar dan mekanisme pemasaran yang rumit (kompas.com, 9 Juli 2014).

### Produk Kedelai

Sedangkan, target swasembada kedelai sebesar 2,5 juta ton tahun 2014, tentunya diharapkan akan dapat tercapai, meskipun fenomena atas produksi dan kebutuhan yang sangat besar celah distorsinya, ditambah meningkatnya harga kedelai dunia terutama selama 4 tahun terakhir. Areal panen kedelai nasional menurun drastis



sampai 6% per tahun dan kini hanya tinggal sekitar 567.000 hektar. Sekedar perbandingan, lahan kedelai pernah seluas 1,4 juta hektar dan produksi kedelai pernah mencapai 1,8 juta ton awal tahun 1990-an. Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, harus mulai memikirkan upaya meningkatkan produktivitas hingga swasembada kedelai di dalam negeri, mengingat

komoditas tersebut sangat terkait dengan hajat hidup rakyat kebanyakan. Hal itu juga mengingat kedelai adalah sumber gizi protein yang murah. Selain itu, Kementerian Pertanian perlu memikirkan dan memasyarakatkan komoditas biji-bijian lain yang bisa menjadi substitusi dari kedelai dalam proses produksi tahu dan tempe. Ini penting menjadi alternatif solusi peningkatan jumlah produksi kedelai menuju swasembada di tahun 2014.

### Produksi Daging Sapi

Impor daging Indonesia saat ini, sebesar 30% yang didatangkan dari Australia dan Selandia Baru. Jumlah impor itu harus terus berkurang hingga tersisa 10% dan 90% bisa dipenuhi dari daging lokal. Keadaan sebenarnya, Kebijakan pemerintah bagi pembatasan impor sapi, sudah diberlakukan sejak 2010 lalu. Dengan harapan, pada 2014 mendatang, Indonesia hanya mengimpor 85.000 ekor sapi dari saat ini yang mencapai 260.000 ekor sapi atau setara 460.000 ton daging sapi.

Data sensus menunjukkan, total jumlah sapi di Indonesia saat ini sekitar 16 juta ekor. Keseriusan pemerintah, terlihat dengan mendorong empat gubernur wilayah Indonesia yang merupakan sentra daging sapi di Indonesia yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat untuk potensi perte nakan sapi guna menargetkan Indonesia agar mampu swasembada daging pada 2014. Uraian di atas tentunya telah memadai untuk menjelaskan kinerja produksi pangan dalam negeri yang sangat rentan atas gejolak produksi dan harga pangan di luar negeri.

### Percepatan Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

Pemerintah dalam Program Prioritas Pembangunan di Bidang Pertanian, telah menargetkan pada tahun 2014 untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan, mengharapkan jumlah target produksi padi sebesar 75,70 juta ton, untuk produksi jagung sebesar 29 juta ton, kedelai sebesar 2,7 juta ton

serta produksi gula sebesar 4,81 juta ton sedangkan untuk daging sapi sebesar 0,55 juta ton.

Penekanan ini tidaklah berlebihan jika dilihat dari fakta yang ada. Setiap kebijakan tanpa ada dukungan dari pemerintah daerah tak akan bisa berjalan. Apalagi, masing-masing daerah, memiliki potensi besar untuk mengembangkan komoditas pangan strategis. Selain itu peran pemerintah daerah sangat vital dalam menyukseskan rencana swasembada dan swasembada berkelanjutan.

Pada sisi lain kepastian penambahan lahan untuk produksi menjadi syarat utama yang harus segera direalisasikan dalam waktu yang singkat. Mengacu pada faktor-faktor penentu keberhasilan produksi, faktor ketersediaan lahan menempati proporsi terbesar. Sekurangnya 40% keberhasilan target produksi ditentukan oleh faktor lahan. Karenanya pemerintah perlu secara tegas menentukan dan memperluas lahan produksi tidak hanya berpusat pada lahan sawah. Agar program ini dapat berjalan, diperlukan dukungan sarana infrastruktur dan kebijakan lainnya dalam rangka mendukung program tersebut.

Sumber daya alam telah semakin terbatas bagi peningkatan produksi pangan, sehingga kita dituntut untuk memanfaatkan secara lebih arif dan bijaksana. walaupun demikian kita harus mendukung dan mempercayai bahwa kita, seluruh komponen bangsa, masih mempunyai semangat dan kemampuan yang bisa kita satukan untuk melakukan pekerjaan besar tersebut, yaitu mewujudkan swasembada dan swasembada berkelanjutan pada tahun 2014. \*\*\*



# Bedah Kampung Memutus Rantai Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan kini telah menjadi fokus program di berbagai kementerian. Kementerian Sosial misalnya telah mencanangkan program bedah kampung untuk menanggulangi kemiskinan. Dan di tahun 2012 ini ada 1.000 rumah yang direhabilitasi oleh Kemensos di seluruh Indonesia.





Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri meresmikan peluncuran Program Bedah Kampung di Desa Mulyamekar Kecamatan Babak

**U**paya penanggulangan kemiskinan tidak saja sekedar berkuat pada data dan angka jumlah masyarakat miskin, tapi lebih dari itu kemiskinan harus ditanggulangi lewat upaya nyata membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal itulah yang kemudian menjadi perhatian kementerian sosial untuk mencanangkan program bedah kampung sebagai program yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan.

Program bedah kampung yang dicanangkan Kementerian Sosial itu merupakan upaya

untuk memutus mata rantai kemiskinan yang terdapat di suatu kampung dengan konsep memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni, tujuannya adalah supaya warganya dapat hidup lebih layak. Program ini juga melibatkan berbagai unsur masyarakat setempat misalnya elemen pemerintahan daerah, TNI, Polri, Tagana, Karang Taruna, Perguruan Tinggi dan organisasi-organisasi sosial di masyarakat.

"Upaya pengentasan kemiskinan melalui program bedah kampung dengan fasilitas perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) juga dimaksudkan untuk

makin meningkatkan semangat gotong royong dan kepedulian antarwarga," kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.

Dalam kunjungan kerjanya di Kota Serang, Provinsi Banten beberapa waktu lalu, Mensos mengakui bahwa jumlah orang miskin saat ini masih besar sekali. Berdasarkan data BPS Maret 2012, jumlah orang miskin sebesar 29,13 juta orang (11,96 persen). Padahal dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintah sudah menyediakan beberapa program-program seperti penyediaan beras raskin, PKH, Jamkesmas, BOS, dsb. Begitu pula dalam APBD daerah

telah meningkatkan anggarannya untuk penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

"Tinggal bagaimana daerah mau memprioritaskan masalah penanggulangan kemiskinan menjadi program prioritas, sebagaimana program prioritas pemerintah pusat dalam menanggulangi kemiskinan seperti lansia, penyandang cacat dan pengentasan penyandang masalah kesos lainnya. Program kemiskinan di daerah sudah banyak hanya saja tetap perlu ditingkatkan," kata Salim.

"Contoh, di pusat anakpun menjadi prioritas tapi kita belum sanggup menangani 100 persen masalah anak terlantar yang jumlahnya 4,5 juta. Kemensos baru sanggup menangani maksimal 400 ribu anak. Sebab itulah, perlu dukungan peran serta swasta, masyarakat dan dunia usaha," jelas Salim.

Dalam kegiatan Bedah kampung di Kota Serang, Kemensos menyalurkan dana rehabilitasi sosial RTLH Rp1 miliar untuk 100 KK, bantuan sarana lingkungan 2 unit sebesar Rp100 juta, bantuan KUBE Rp200



Bedah rumah UPK "Ngudi Raharjo" Kec Lendah, DIY

juta, kursi roda bagi 5 orang penyandang cacat dan bantuan untuk tuna netra. Total bantuan yang disalurkan Kemensos untuk bedah kampung di Serang sebesar Rp1.306.250.000.

Sedangkan pada kunjungan kerjanya ke daerah Lembang, Jawa Barat, Mensos Salim Al Jufri

**Mensos Salim Al Jufri mengatakan bahwa Kementerian Sosial telah memetakan 1.000 titik untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam program bedah kampung di seluruh Indonesia di tahun 2012 ini.**

mengatakan bahwa Kementerian Sosial telah memetakan 1.000 titik untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam program bedah kampung di seluruh Indonesia di tahun 2012 ini.

"Bedah kampung akan jalan terus, kita akan mapping 1.000 titik tapi saat ini baru sebagian kecil dilakukan pemetaan," kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.

Di daerah Lembang itu, Kementerian Sosial ini telah melakukan rehabilitas 50 unit rumah tidak layak huni. Sedangkan di Purwakarta ada 100 unit rumah yang direhab dan di Bekasi sebanyak 84 unit.

Menurut Mensos, rumah tidak



Rumah warga miskin di Rabangodu Utara, NTB



Pelaksanaan bedah rumah dengan cara gotong-royong

layak huni memang paling banyak berada di Pulau Jawa karena jumlah penduduk yang tinggi. Namun program bedah kampung juga akan dilakukan di luar Pulau Jawa.

Dari data yang dikumpulkan Kementerian Sosial terdapat 2,3 juta rumah tidak layak huni tersebar seluruh Indonesia, tetapi anggaran Kementerian Sosial setiap tahunnya hanya mampu untuk membedah 15.000 unit rumah. Program bedah kampung ini merupakan model pengembangan pemberdayaan masyarakat miskin melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilakukan di wilayah kampung selama lima hari.

### Tentang Program Bedah Kampung

Program Bedah Kampung merupakan wujud tanggungjawab terhadap lingkungan dan sosial. Berada pada ranah penyelenggaraan kesejahteraan sosial berkelanjutan dimaknai sebagai pendekatan yang mensinergikan kebutuhan akan keberlanjutan ekonomi, lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Selain itu Program Bedah Kampung menjadi investasi sosial yang pada gilirannya akan memperlancar



penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Program, dana dan cakupan wilayah praktek Bedah Rumah disinergikan dengan program pembangunan daerah dengan prioritas pada pengembangan sumberdaya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan masalah keterbelakangan lainnya. Kemiskinan menjadi fokus pembangunan, karena kemiskinan tidak hanya mengurangi akses masyarakat untuk mendapatkan sumber penghidupan, namun juga meningkatkan kerawanan sosial. Paradigma pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai salah satu biang dari peminggiran masyarakat. Kini dan kedepan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial berkelanjutan menjadi tuntutan paradigma dalam membangun daerah.

Pemanfaatan lahan yang bersifat ekspansif dapat berdampak negatif terhadap masyarakat. Kecemburuan sosial masyarakat akibat kesenjangan pola hidup "komuniti" berpotensi menimbulkan konflik dan masalah-masalah kesejahteraan



Pelaksanaan bedah rumah dengan cara gotong-royong di Desa Durungan, Wates, Kulonprogo

sosial lainnya. "Komuniti" adalah entitas sosial sehingga wajib memiliki tanggung jawab sosial dengan memperlakukan masyarakat sekitarnya sebagai sesuatu yang berdiri sejajar dan saling membutuhkan.

Keberhasilan membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar menjadi kekuatan untuk hubungan lebih luas dengan stakeholder nasional. Keterlibatan

para stakeholder dalam Program Bedah Kampung ini bertujuan agar terjalin hubungan harmonis antar para *stakeholder* terutama masyarakat dan pihak swasta sehingga membuka komunikasi yang santun, bersahabat dan produktif; menumbuhkan rasa saling memiliki, rasa ikut andil terhadap keberhasilan pembangunan masyarakat serta membuka ruang bagi para stakeholder untuk membangun sistem dan mekanisme pelaksanaan Bedah Kampung sehingga pihak yang terlibat paham akan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya masing-masing.

Bedah kampung diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang serta menghasilkan kemandirian masyarakat yang berkelanjutan serta berdampak positif terhadap kinerja pemerintah. Partisipasi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa sangat diperlukan untuk suksesnya Program Bedah Kampung ini.

■ Iw/humas Depsos



BEDAH RUMAH dalam program Satu Miliar Satu Kecamatan (SAMISAKI) oleh Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2011

## Bedah Rumah

# Rumah Layak Huni untuk Rakyat Miskin

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) meluncurkan Program Bedah Rumah. Tujuannya untuk membantu rakyat miskin memiliki rumah layak huni. Diperkirakan ada 250.000 rumah di tahun ini yang menjadi target program bedah rumah dari 500 ribu rumah yang akan digarap oleh Kemenpera.



Rumah yang akan mendapat program bedah rumah

**P**rogram peningkatan kualitas rumah yang tidak layak huni bagi masyarakat miskin atau disebut Program Bedah Rumah yang dilakukan oleh Kemenpera, diyakini sebagai langkah untuk memangkas indikator kemiskinan yang seluruhnya ada lima belas indikator. Diantaranya masyarakat miskin yang rumahnya tidak terdapat fasilitas WC, sumber air bersih, memiliki rumah dengan luas lantai dibawah 8 meter persegi, beratap rumbia dan lantai tanah. Selain itu, penghasilan penghuninya juga masih dibawah Rp 600.000,-perbulan.

Satu unit rumah yang dibedah mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar Rp. 6 Juta. Selain itu, ada juga bantuan dari luar seperti Infak, dana CSR dari perusahaan maupun BUMN. Bahkan seringkali bantuan datang dari masyarakat yang kaya kepada masyarakat miskin di lokasi bedah rumah tersebut. Misalnya ada yang memberikan genteng bekas dan kayu bekas. "Bantuan yang turun dari masyarakat itu bisa menambah nilai bedah rumah dari Rp. 6 juta menjadi Rp. 20 juta", kata Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz.

"Saya memberikan apresiasi atas kegiatan gotong royong yang dilakukan masyarakat dalam melakukan program bedah rumah, karena gotong royong sendiri dilakukan atas dasar sukarela tidak ada upah dan hal ini juga sebagai pembuktian bahwa sistem gotong royong masih kuat di Indonesia", tambah Djan Faridz.

Menpera juga menjelaskan bahwa Program bedah rumah ini akan dilakukan di seluruh kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya satu kabupaten/



Bedah rumah Desa Balewangi, Garut

kota ada satu program bedah rumah dengan target tuntas dikerjakan dalam satu tahun. Dan program ini juga mendapat dukungan dari Presiden.

Namun demikian kata Menpera, bahwa Program bedah rumah ini diperkirakan berjalan dua tahun karena melihat juga kesiapan Pemda.

"Apabila melihat kesiapan pemda program bedah rumah bisa menghabiskan dua tahun. Tahun pertama kita bisa mengatakan 50 persen selesai dan baru tahun

keduanya kita bisa menyatakan 100 persen bedah rumah selesai untuk satu kawasan menjadi kawasan bebas rumah kumuh," ujarnya.

Ditambahkan juga bahwa Presiden sangat antusias terhadap program bedah rumah ini dan tambahan quota akan diberikan kepada Kemenpera sebanyak 500 ribu unit apabila mampu, akan tetapi untuk tahun ini kami cukup di angka 250.000 unit rumah yang menjadi target bedah rumah.

■ Iw/Humas Menpera

## Benarkah Jumlah Penduduk Miskin Meningkat?

Setahun yang lalu, tepatnya bulan Oktober 2011, berbagai media elektronik ditanah air menurunkan berita yang seragam tentang kemiskinan di Indonesia yang dikatakan meningkat. Kebenaran dari berita tersebut patut diragukan karena hanya berdasarkan pada secarik makalah kerja (*working paper*) Bank Pembangunan Asia (ADB), yang tentu saja tidak mencerminkan pendapat resmi ADB.

Untuk itu, maka pada edisi kali ini Majalah Progres mencoba menampilkan ulasan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan tajuk seperti tertulis diatas. Didalamnya berisi fakta-fakta tentang kemiskinan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional - Badan Pusat Statistik (SUSENAS - BPS). Ulasan tentang ini juga dimuat dalam *website* resmi tnp2k yakni <http://www.tnp2k.go.id/> Berikut kutipannya.

### IKHTISAR

Inti dari tulisan ini adalah:

1. Data survei menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan;
2. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin secara konsisten menurun meskipun menggunakan garis kemiskinan yang lebih tinggi;
3. Adanya kesempatan bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan.

Pada dasarnya, untuk menghitung jumlah orang miskin diperlukan 2 informasi:

1. Distribusi konsumsi/pengeluaran penduduk Indonesia.
2. Garis kemiskinan yang digunakan sebagai standar penentuan status.

Beberapa media elektronik pada hari Rabu, 26 Oktober 2011, menurunkan artikel yang isinya seragam: kemiskinan di Indonesia meningkat. Menurut berita-berita tersebut, jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah sebesar 2,7 juta orang, dari 40,4 juta orang pada tahun 2008 menjadi 43,1 juta pada tahun 2010. Berita-berita itu juga menulis bahwa pemerintah menerapkan garis kemiskinan yang terlalu rendah untuk tujuan politis, agar angka kemiskinan terlihat

lebih kecil. Di saat yang sama, pemerintah juga dianggap gagal mengatasi masalah kesenjangan pendapatan, karena yang miskin tetap miskin sementara kelompok terkaya semakin meningkat kesejahteraannya.

Berita tersebut dikutip dari peneliti Perkumpulan Prakarsa, yang merujuk pada studi oleh Guanghai Wan and Iva Sebastian berjudul "Poverty in the Asia and Pacific: an Update", yang diterbitkan sebagai makalah kerja (*working paper*) Bank Pembangunan Asia (ADB), bulan

Agustus 2011. Perlu digarisbawahi bahwa makalah kerja tidak sama dengan laporan ADB, dan karenanya tidak mencerminkan pendapat resmi ADB. Temuan dari makalah kerja ini berbeda dengan angka resmi acuan pemerintah Indonesia. Menurut perhitungan Pemerintah yang diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional - Badan Pusat Statistik (SUSENAS - BPS), angka kemiskinan justru mengalami penurunan dari 35 juta orang di tahun 2008 menjadi 31 juta orang di tahun 2010. Di tahun 2011 angka kemiskinan

terus turun menjadi 30 juta orang.

Karena perbedaan angka kemiskinan akan membawa implikasi pada penilaian atas kebijakan yang sudah dan akan diambil, Pemerintah berkepentingan untuk mengkaji berbagai perhitungan yang dilakukan, dan membandingkan dengan perhitungan pemerintah. Pada akhirnya, setiap perbedaan hasil adalah masukan untuk menyempurnakan perhitungan angka kemiskinan.

Tulisan ini menanggapi tiga kritik yang disebut di atas. Inti dari tulisan ini adalah: 1) data survei menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan, 2) analisis sensitivitas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin secara konsisten menurun meskipun menggunakan garis kemiskinan yang lebih tinggi, dan 3) adanya kesempatan bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan.

### Jumlah Penduduk Miskin Menurun, Bukan Meningkatkan

Pada dasarnya, untuk menghitung jumlah orang miskin diperlukan 2 (dua) informasi. Pertama, distribusi konsumsi/pengeluaran penduduk Indonesia. Kedua, garis kemiskinan yang digunakan sebagai standar penentuan status. Tanpa kedua informasi tersebut sudah tentu tidak dapat dihitung jumlah orang yang dikategorikan sebagai penduduk miskin. Dari hasil kajian yang dilakukan beberapa peneliti ahli di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), terdapat beberapa hal yang dapat digunakan sebagai klarifikasi dari laporan Perkumpulan Prakarsa.

Menurut rilis Perkumpulan Prakarsa, garis kemiskinan

ditetapkan sebesar Rp 7.000 di tahun 2008 dan Rp 7.800 di tahun 2010. Disebutkan bahwa angka ini mengacu pada garis kemiskinan US\$1.25 dalam Purchasing Power Parity (PPP) yang digunakan oleh Wan dan Sebastian (2011). Untuk mereplikasi temuan itu, TNP2K menerapkan garis kemiskinan tersebut pada distribusi konsumsi/pengeluaran yang didapat dari SUSENAS. Mengapa SUSENAS? Karena hanya melalui SUSENAS, survei rumah tangga tahunan berskala nasional, kita dapat memperoleh distribusi konsumsi/pengeluaran penduduk Indonesia<sup>1</sup>. Garis kemiskinan sebesar itu ekuivalen dengan Rp 210.000 per kapita per bulan pada tahun 2008, dan Rp 234.000 per kapita per bulan pada tahun 2011. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut (Tabel 1):

yang dihasilkan oleh Wan dan Sebastian (2011).

Mengapa ada perbedaan? Dalam makalah kerjanya, Wan dan Sebastian (2011) menjelaskan bahwa angka-angka kemiskinan yang mereka sajikan merupakan hasil prediksi dengan menggunakan estimasi elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi (growth elasticity of poverty). Dengan demikian, perhitungan jumlah penduduk miskin bukan diperoleh dari data distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk aktual dari SUSENAS atau survei rumah tangga lainnya.

Perlu dipahami bahwa tujuan studi Wan dan Sebastian (2011) adalah memberikan tinjauan tentang kondisi kemiskinan di kawasan Asia dan Pasifik, terutama dalam hubungannya dengan

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Menggunakan Garis Kemiskinan Rp7.000 dan Rp7.800/Kapita/Hari			
TAHUN	GARIS KEMISKINAN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN SUSENAS	LAPORAN PERKUMPULAN PRAKARSA
2008	Rp. 7.000/kapita/hari		
	Rp. 210.000/kapita/bulan	63,8 Juta	40,1 Juta
2010	Rp. 7.800/kapita/hari		
	Rp. 234.000/kapita/bulan	51,9 Juta	43,1 Juta

Tabel 1 menunjukkan bahwa menggunakan garis kemiskinan yang disebutkan dalam laporan Perkumpulan Prakarsa, ternyata menghasilkan jumlah penduduk miskin yang lebih kecil. Dengan menerapkan garis kemiskinan yang sama pada distribusi konsumsi/pengeluaran SUSENAS, diperoleh jumlah penduduk miskin sebanyak 63,8 juta di tahun 2008. Sementara menggunakan angka yang disebutkan dalam laporan Perkumpulan Prakarsa diperoleh jumlah penduduk miskin 'hanya' 40,1 juta jiwa. Tim ahli TNP2K tidak dapat mereplikasi angka

dampak dari krisis ekonomi global tahun 2008. Jadi studi ini harus dilihat sebagai sebuah kanvas besar yang menggambarkan situasi di seluruh kawasan, bukan untuk menggambarkan kondisi masing-masing negara. Tidak semua negara punya survei rumah tangga yang baik dan dilakukan secara reguler. Untuk negara-negara ini, bisa dimengerti jika perhitungan dampak krisis terhadap kemiskinan hanya bisa dilakukan lewat prediksi. Tapi dalam kasus Indonesia, dengan adanya SUSENAS memungkinkan kita melakukan perhitungan



berdasarkan data aktual, yang tentunya lebih menggambarkan realitas. Data 2008-2010 yang dipaparkan oleh Wan dan Sebastian (2011) bukanlah data antarwaktu (time series) yang konsisten dan bukan berdasarkan realisasi tetapi berdasarkan prediksi yang metodologinya dapat bervariasi.

Hal utama yang perlu ditekankan bahwa dalam mengukur kemiskinan diperlukan konsistensi metodologi antar waktu. Apabila prinsip ini dipegang secara ketat maka pernyataan tentang bertambahnya jumlah penduduk miskin di Indonesia antara tahun 2008 dan 2010 secara akademis sulit dipertanggungjawabkan.

Walaupun perhitungan jumlah orang miskin versi pemerintah tidak lepas dari kelemahan, namun demikian temuan Wan dan Sebastian (2011) tidak cukup sah untuk menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2008 ke ke 2010 meningkat.

### Penduduk Miskin Tetap Turun Meski Garis Kemiskinan Dinaikkan

kecil?

Metodologi pengukuran kemiskinan telah cukup berkembang dan beberapa metodologi standar telah berhasil dibakukan. Indonesia, misalnya, menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan hidup dasar (costs of basic needs). Menurut pendekatan ini, garis kemiskinan didefinisikan sebagai pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh sekeranjang makanan dengan kandungan 2.100 kilo kalori per kapita per hari (berdasarkan Widyakarya Pangan dan Gizi Nasional 1978) ditambah dengan pengeluaran untuk memperoleh sejumlah komoditas bukan makanan yang dianggap penting. Penduduk miskin, dengan demikian, adalah mereka yang pengeluaran per kapitanya di bawah Garis Kemiskinan. Metodologi BPS bukannya tanpa kelemahan, akan tetapi tidak ada metodologi yang sempurna dan BPS menggunakan metodologi yang lazim dipraktekkan di banyak negara di dunia.

Pengukuran lain adalah apa yang disebut sebagai 'garis kemiskinan internasional' yang diperkenalkan oleh Bank Dunia.

US\$1,25 dan US\$2 per orang perhari dalam nilai tukar daya beli setara (purchasing power parity (PPP), bukan nilai tukar pasar. Nilai tukar PPP menggambarkan daya beli riil di tiap negara. Uang sebesar US\$1 di Amerika Serikat hanya bisa digunakan untuk membeli pop corn, tapi di India atau Kenya bisa membeli sepori makan siang sederhana. Perbedaan daya beli inilah yang coba ditangkap dalam nilai tukar PPP. Nilai tukar PPP dihitung berdasarkan harga dan kuantitas di masing-masing negara yang dikumpulkan dalam suatu survei yang biasanya dilakukan setiap lima tahun sekali.

Perlu diketahui bahwa perhitungan jumlah penduduk miskin di Indonesia menggunakan dua garis kemiskinan yang berbeda. Hal ini sering tidak diketahui oleh masyarakat. Pertama, garis kemiskinan untuk mereka yang tinggal di perdesaan. Kedua, garis kemiskinan untuk mereka yang tinggal di perkotaan. Bagi negara besar seperti Indonesia perlu dilakukan pembedaan garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan, mengingat adanya perbedaan karakteristik di antara

Tabel 2. Perbandingan garis kemiskinan nasional dan internasional  
GARIS KEMISKINAN (GK) (RP/KAPITA/BULAN)

TAHUN	NASIONAL	DESA		KOTA	
	RUPIAH	RUPIAH	US\$ 1,25/HARI (PPP)	RUPIAH	US\$ 1,25/HARI (PPP)
2008	182.636	161.831	160.968	204.896	227.074
2009	200.262	179.835	173.723	222.123	245.068
2010	211.726	192.354	179.682	232.989	253.475
2011	233.740	213.395	191.632	253.016	270.332

Sisi lain dari perdebatan soal angka kemiskinan adalah berapa seharusnya garis kemiskinan ditetapkan? Betulkah pemerintah menerapkan garis kemiskinan yang terlalu rendah sehingga angka kemiskinan menjadi

Garis kemiskinan internasional dimaksudkan untuk menjadi standar yang memungkinkan perbandingan angka kemiskinan antarnegara. Dalam pendekatan ini, garis kemiskinan ditetapkan sebagai pengeluaran sebesar

keduanya.

Tabel 2 menyajikan perbandingan garis kemiskinan nasional di Indonesia dengan garis kemiskinan internasional, pada standar US\$1,25 per hari, setelah dikonversi ke dalam pengeluaran

per bulan. Ada dua hal penting yang bisa ditarik dari Tabel 2. Pertama, garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah selalu berubah tiap tahun, menyesuaikan dengan harga-harga kebutuhan hidup yang meningkat. Kedua, terlihat bahwa garis kemiskinan versi pemerintah tidak jauh berbeda dengan garis kemiskinan internasional. Untuk perdesaan, garis kemiskinan nasional bahkan nilainya sedikit lebih tinggi dari

sejak tahun 2006.

Agar lebih jelas, TNP2K menghitung jumlah penduduk miskin dan angka tingkat kemiskinan menggunakan data SUSENAS dengan beberapa skenario garis kemiskinan: dari sepuluh persen hingga dua kali lebih tinggi dari garis kemiskinan yang digunakan sekarang. Ini bisa dilihat sebagai uji sensitivitas tingkat kemiskinan terhadap garis kemiskinan. Hasil

bahwa pemerintah sengaja 'memilih' garis kemiskinan untuk menunjukkan prestasi yang baik dalam menurunkan tingkat kemiskinan adalah anggapan yang tidak sesuai dengan data.

Gambar 1. Angka kemiskinan menurut tiga garis kemiskinan

### Banyak Penduduk Miskin Bisa Keluar Dari Kemiskinan

Isu ketiga terkait dengan distribusi pendapatan dan

Tabel 3. Uji sensitivitas angka kemiskinan menurut beberapa besaran garis kemiskinan

BATAS	TAHUN 2006		TAHUN 2007		TAHUN 2008		TAHUN 2009		TAHUN 2010	
	JUMLAH (JUTA)	%	JUMLAH (JUTA)	%	JUMLAH (JUTA)	%	JUMLAH (JUTA)	%	JUMLAH (JUTA)	%
GK	39,3	17,76	37,2	16,58	34,9	15,42	32,5	14,15	31,0	13,33
1.1*GK	52,0	23,49	50,6	22,56	49,2	21,71	45,3	19,70	43,4	18,64
1.2*GK	65,6	29,63	64,0	28,54	63,0	27,81	58,8	25,58	56,7	24,38
1.4*GK	91,7	41,44	89,8	40,05	86,4	38,11	85,2	37,05	80,9	34,74
1.6*GK	114,5	51,74	113,7	50,72	109,2	48,16	109,2	47,51	101,4	43,56
1.8*GK	134,7	60,85	132,6	59,12	129,0	56,92	129,9	56,50	119,4	51,29
2.0*GK	150,2	67,87	147,9	65,97	145,9	64,35	147,0	63,92	135,0	58,00

garis kemiskinan internasional. Artinya, perhitungan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah secara umum cukup konsisten dan bisa dibandingkan dengan perhitungan menurut garis kemiskinan internasional.

Bagaimana pengaruh perbedaan garis kemiskinan terhadap perhitungan angka kemiskinan? Pada Gambar 1 terlihat bahwa tingkat kemiskinan (headcount ratio) versi Pemerintah sebenarnya lebih tinggi dari perhitungan berdasarkan standar US\$1,25 per hari (PPP). Memang kita melihat adanya perbedaan yang sangat besar jika standar yang digunakan adalah US\$2 per hari (PPP). Tetapi, garis kemiskinan manapun yang digunakan, ketiganya secara konsisten menunjukkan tren tingkat kemiskinan yang menurun

perhitungan bisa dilihat di Tabel 3. Terlihat bahwa berapapun garis kemiskinan yang ditetapkan, baik jumlah penduduk miskin maupun tingkat kemiskinan secara konsisten menurun antarwaktu.

Dengan kata lain, anggapan

mobilitas vertikal. Kelompok Prakarsa seperti dikutip berbagai media mengatakan bahwa beberapa tahun terakhir hanya sedikit jumlah penduduk miskin yang keluar dari kemiskinan, sementara penduduk menengah



**Tabel 4. Matriks Peralihan Penduduk Miskin yang Naik-Turun Status**

STATUS KEMISKINAN 2009			
STATUS KEMISKINAN 2008	Unit	Miskin	Tidak Miskin
Miskin	%	45.6	54.4
Tidak Miskin	%	7.6	92.4

STATUS KEMISKINAN 2010			
STATUS KEMISKINAN 2009	Unit	Miskin	Tidak Miskin
Miskin	%	46.4	53.6
Tidak Miskin	%	7.3	92.7

dan kaya terus mengakumulasi kekayaan. Makna implisit dari pernyataan ini adalah penduduk miskin di Indonesia 'terperangkap' dalam kemiskinan dan tidak punya mekanisme untuk keluar dari jerat kemiskinan. Benarkah begitu?

Data BPS menunjukkan bahwa setiap tahun jutaan penduduk

pada 2008 jatuh miskin pada 2009. Akibatnya, secara neto penurunan jumlah penduduk miskin yang cukup besar itu tertutup oleh adanya kelompok tidak miskin yang jatuh miskin. Pola yang sama juga terjadi antara 2009 dan 2010. Pada periode tersebut sebanyak 53% penduduk yang miskin pada 2009 keluar dari kemiskinan pada

lebih tinggi pada tahun 2010.

Fakta di atas memperlihatkan bahwa, di satu sisi, ada sejumlah besar penduduk miskin yang keluar dari kemiskinan, di sisi lain, tetapi sejumlah penduduk lainnya jatuh dari tidak miskin menjadi miskin. Hipotesis tentang adanya 'jeratan kemiskinan' disanggah oleh data ini. Implikasi dari hal ini adalah bahwa selain dari upaya mengangkat penduduk miskin keluar dari kemiskinan, juga sangat diperlukan upaya mencegah agar mereka yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan tidak kembali lagi jatuh miskin. Salah satu upaya pencegahan agar penduduk tidak jatuh miskin dilakukan dengan kebijakan perlindungan sosial.

## Penutup

**Tabel 5. Dinamika Pergerakan Penduduk Miskin (Juta orang) yang Naik-Turun Kelas Pendapatan, 2009—2010**

2009	DESIL PENDAPATAN 2010										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
1	11	5,1	2,6	1,8	1,1	0,8	0,5	0,3	0,1	0,1	23,3
2	4,9	5,6	4,1	2,8	1,9	1,3	0,9	0,4	0,2	0,1	22,3
3	2,9	3,9	4,4	3,2	2,7	1,7	1,0	0,8	0,4	0,2	21,2
4	1,5	2,8	3,7	3,7	3,1	2,4	1,7	1,1	0,5	0,2	20,7
5	0,9	1,7	2,6	3,5	3,3	2,9	2,4	1,5	1,1	0,3	20,3
6	0,5	1,1	1,5	2,6	3,3	3,5	3,0	2,3	1,3	0,5	19,8
7	0,3	0,7	1,3	1,9	2,4	3,3	3,4	3,1	2,3	0,9	19,5
8	0,2	0,4	0,7	1,1	1,6	2,4	3,4	4,1	3,6	1,9	19,3
9	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1,3	2,1	3,8	5,6	4,0	18,8
10	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,9	1,6	3,7	10,4	17,8
<b>Total</b>	<b>22,3</b>	<b>21,6</b>	<b>21,4</b>	<b>21,3</b>	<b>20,5</b>	<b>20,2</b>	<b>19,4</b>	<b>19,0</b>	<b>18,9</b>	<b>18,3</b>	<b>203,0</b>

Indonesia telah berhasil keluar dari kemiskinan. Misalnya, hampir 19 juta penduduk yang miskin pada 2008 telah berhasil keluar dari kemiskinan pada 2009. Akan tetapi, pada saat yang sama terdapat jutaan orang yang semula tidak miskin jatuh menjadi miskin. Misalnya, 7,6% dari penduduk yang tidak miskin

2010 (lihat Tabel 4).

Lebih jauh Tabel 5 di bawah memperlihatkan dinamika pergerakan penduduk yang naik turun kelas sosial-ekonomi antara tahun 2009 dan 2010 secara lebih rinci. Terdapat lebih dari 12 juta orang yang naik kelas dari desil pertama (kelompok 10% termiskin) ke desil-desil yang

"Poverty, like beauty, lies in the eyes of the beholder." Demikian tulis ekonom Paul Orshansky beberapa tahun silam. Pernyataan ini tidak keliru. Siapa saja yang tergolong penduduk miskin, dan berapa yang masuk dalam kategori ini, sangat tergantung dari bagaimana kita mendefinisikan kemiskinan. Namun demikian,

acuan yang jelas tentang siapa yang termasuk kelompok miskin tetap diperlukan. Dalam konteks kebijakan publik, acuan diperlukan untuk setidaknya dua alasan: Pertama, dalam rangka menetapkan siapa target penerima program bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Kedua, mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pembangunan di suatu negara. Untuk itu dibutuhkan standar kemiskinan yang konsisten dan bisa dibandingkan antarwaktu.

Seperti disampaikan sebelumnya, untuk menghitung jumlah orang miskin dibutuhkan dua hal. Pertama, penetapan garis kemiskinan. Perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi

ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dalam implementasinya dihitunglah garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata konsumsi/pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin.

Kedua, distribusi konsumsi/pengeluaran dari penduduk Indonesia. Distribusi tersebut diperoleh dari SUSENAS yang dilakukan oleh BPS. Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang memiliki survei konsumsi rumah tangga yang dilaksanakan secara reguler dengan jumlah sampel yang sedemikian besar. SUSENAS selama ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung tingkat kemiskinan.

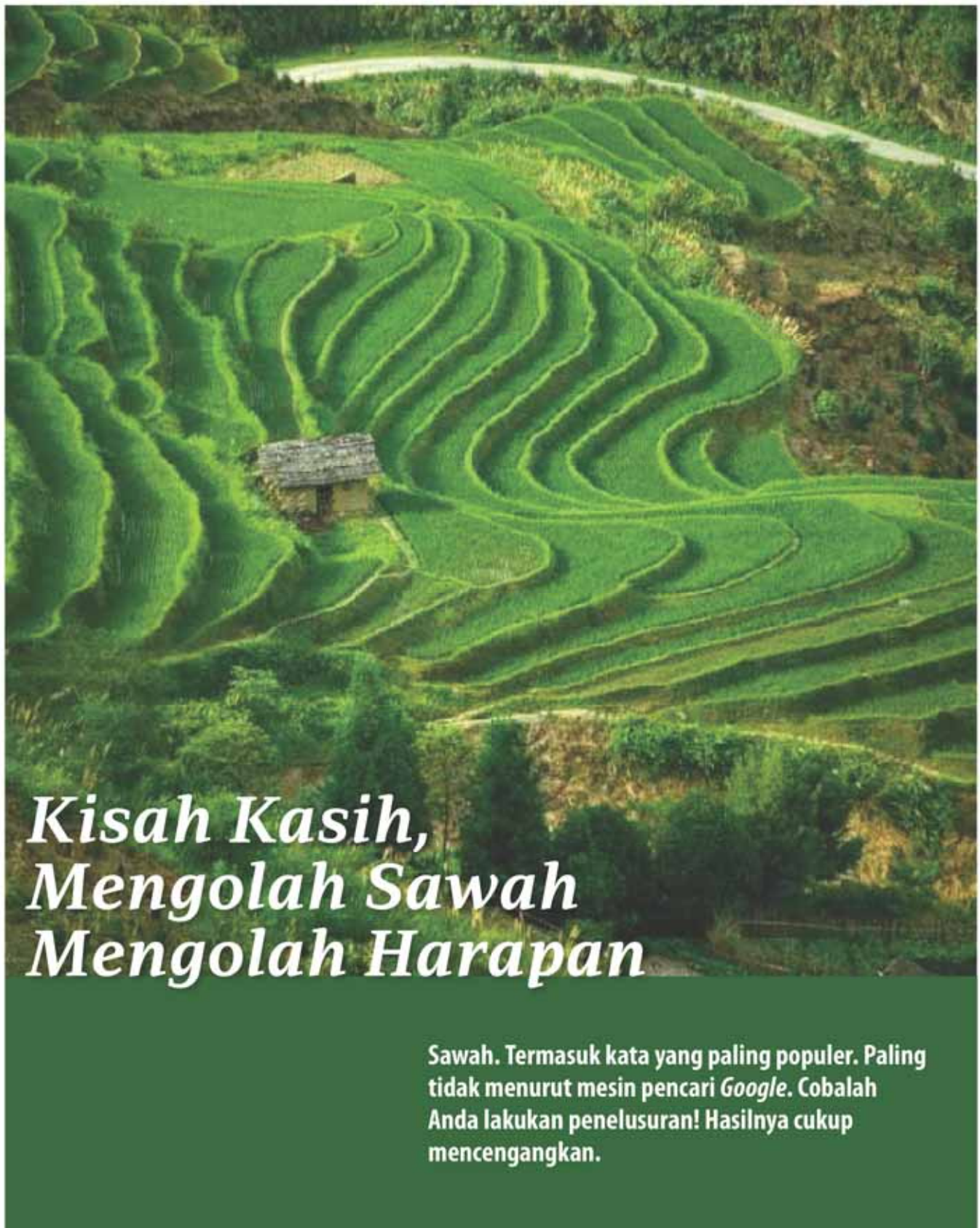
Pemerintah Indonesia membuka diri terhadap berbagai metode alternatif perhitungan

tingkat kemiskinan. Ini diperlukan sebagai pembanding bagi apa yang sudah dikerjakan pemerintah. Perdebatan soal kemiskinan di Indonesia yang makin terbuka adalah sebuah langkah maju. Sangat menggembirakan ketika argumentasi didasarkan atas studi ilmiah, tidak hanya mengandalkan jargon belaka. Apa yang dilakukan pemerintah harus terus dikritisi. Di saat yang sama, kita juga tentu perlu kritis terhadap berbagai studi mengenai perhitungan tingkat kemiskinan, terutama terkait dengan metode perhitungannya. Uraian di atas menunjukkan bahwa dengan beberapa cara alternatif garis kemiskinan, antara tahun 2008-2010 terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Dari uraian di atas terlihat pula bahwa penduduk miskin Indonesia mempunyai kesempatan untuk keluar dari kemiskinan.

■ [lw/tn2k.go.id](http://lw/tn2k.go.id)



Bedah rumah di kelurahan Magersari, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah



## *Kisah Kasih, Mengolah Sawah Mengolah Harapan*

Sawah. Termasuk kata yang paling populer. Paling tidak menurut mesin pencari *Google*. Cobalah Anda lakukan penelusuran! Hasilnya cukup mencengangkan.

**S**ekitar 4.960.000 (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu) kata "sawah" dihasilkan Google dalam waktu 0.13 detik. Sebagai perbandingan, yang lebih mencengangkan lagi kata yang masih bersaudara dengan sawah yakni kata "padi" misalnya si Google mencatat sekitar 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu) masih dalam waktu yang sama yakni 0.13 detik. Kata petani lebih populer lagi, sekitar 28.000.000 (dua puluh delapan juta) kata yang dihasilkan, tapi dalam waktu 0.19 detik, selisih 0.06 detik dengan waktu saat mencari kata sawah dan kata padi. Kata "pangan" lebih mencengangkan lagi, sekitar 8.660.000.000 (delapan milyar enam ratus enam puluh ribu) yang dihasilkan mesin pencari kata tersebut dalam waktu 0.43 detik, selisih waktu 30 detik dibandingkan dengan waktu pencarian terhadap kata sawah.

Penelusuran Google terhadap kata "sawah" itu tentu akan bertambah dari detik ke detik. Hal itu paling tidak dapat dijadikan ukuran keberterimaan betapa kata "sawah" begitu familiar di jagat internet sekalipun. Bahkan

yang namanya sawah sudah dikenal sejak zaman *baheula*. Hal itu ditunjukkan dengan kebiasaan nenek moyang manusia yang suka mengolah lahan pertanian alias bercocok tanam. Sawah sejatinya berhubungan dengan aktivitas sosial, ekonomi, politik dan budaya suatu bangsa. Membicarakan ketahanan pangan pun niscaya akan terkait dengan membicarakan bagaimana mengolah lahan persawahan.

Merujuk pada *Wikipedia*, sawah adalah lahan usaha pertanian yang secara fisik berpermukaan rata, dibatasi oleh pematang, serta dapat ditanami padi, palawija atau tanaman budidaya lainnya. Kebanyakan sawah digunakan untuk bercocok tanam padi. Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah digunakan sistem irigasi dari mata air, sungai atau air hujan. Sawah yang mengandalkan curah air hujan dikenal sebagai sawah tadah hujan, sementara yang lainnya adalah sawah irigasi. Padi yang ditanam di sawah dikenal sebagai

padi lahan basah (*lowland rice*).

## Mengolah Sawah

Mengolah lahan sawah tentunya perlu perlakuan secara baik. Sawah juga ingin dicinta dan dimanja, seperti kekasih. Sawah merupakan "kekasihnya" para petani. Para petani tidak pernah semena-mena memperlakukan sawah. Ada aturan yang dianut atau semacam "tata krama" para petani bagaimana merawat dan mengolah sawah. Bahkan ada acara ritual atau ruwat sebelum memulai menggarap sawah. Hal itu menunjukkan para petani sungguh-sungguh mengolah sawah di mana sawah telah memberikan penghidupan bagi keluarga.

Secara tradisional ada istilah-istilah ketika akan memulai menggarap sawah yang mungkin anak muda zaman sekarang merasa asing dengan istilah-istilah tersebut. Yaitu istilah Babad damen, artinya kegiatan untuk memangkas seluruh jerami yang ada di sawah. Nembok yaitu membersihkan pematang sawah dan menambal kembali dengan tanah/lumpur sawah yang baru. Ngaluku, membajak tahap



pertama yaitu membajak sawah dengan menggunakan satu set alat bajak dengan memanfaatkan tenaga kerbau atau sapi. Dengan ngaluku ini bertujuan untuk membalik permukaan tanah dari seluruh permukaan tanah sawah. Setelah diluku, sawah dibiarkan dahulu agar rumput-rumput yang tertimbun (setelah dari proses pembalikan tanah) membusuk. Biasanya dalam satu minggu. Kemudian ada istilah Ngagaru

cara dibajak. Kegiatan mengolah lahan sawah juga bagi para petani, otomatis membuka peluang usaha. Contohnya usaha jasa bajak sawah, baik menggunakan tenaga kerbau atau sapi, maupun menggunakan alat yang lebih canggih seperti traktor. Bahkan ada yang masih menggunakan tenaga manusia.

Dulu, orang membajak sawah dengan menggunakan tenaga sapi atau kerbau, sekarang sudah

tergantung pada tradisi dan kepercayaan atau terkait dengan budaya setempat sebagai kearifan lokal. Kalau memakai traktor, memang lebih praktis dan hasil bajakannya lebih padat. Tapi mereka harus mengeluarkan biaya untuk membeli bahan bakar bensin atau solar untuk mesin traktor.

Di luar negeri, pengerjaan tanah pertanian memang sepenuhnya boleh dikatakan sudah dengan menggunakan cara-cara modern, bahkan tidak terkungkung oleh mitos-mitos. Mereka menggunakan alat-alat untuk mengerjakan sawah-sawah dalam skala besar hampir semuanya dilakukan dengan mesin. Hasil yang diperoleh daripadanya jelas lebih efektif. Peran bantuan orang lain dan binatang menjadi lebih minimal.

Di Indonesia pada umumnya, alat-alat pertanian tradisional, baik alat berat maupun ringan masih digunakan oleh para petani. Luku yang ditarik kerbau atau sapi misalnya, masih banyak digunakan sekalipun traktor mesin juga mulai merambah tanah-tanah pertanian. Para petani banyak yang beralasan, luku yang ditarik binatang ternyata mata bajaknya lebih dalam menghunjam tanah sehingga kegemburan tanah pertanian bisa lebih dalam dibandingkan dengan hasil kinerja traktor mesin.

Alasan petani tidak menggunakan mesin tangan masalahnya mungkin karena perawatannya tidak sederhana dan tidak murah. Mesin yang sudah rusak di pasaran akan jatuh harga jualnya sementara alat pertanian tradisional relatif lebih murah dan mudah perawatannya. Boleh jadi kecintaan atau hubungan emosional antara petani-binatang-tanaman-dan



yaitu membajak tahap kedua, jika ngaluku adalah membalik tanah, maka ngagaru adalah meratakan tanah dan menghancurkan gumpalan-gumpalan tanah dan menyapu sisa-sisa rerumputan yang tidak membusuk hidup lagi. Setelah seluruh permukaan tanah cukup rata dan gembur, maka siap untuk ditanami bibit padi. Selanjutnya adalah Tandur yaitu kegiatan menanam padi.

Untuk menanam padi dibutuhkan pengolahan tanah yang bagus sebelum masa tanam. Salah satunya adalah dengan mengemburkan tanah dengan

banyak yang menggunakan traktor. Menggunakan sapi dan kerbau dianggap kecepatan menyelesaikan pekerjaannya sangat lambat, maka banyak petani berpaling membajak sawah menggunakan mesin. Mesinisasi pertanian juga mulai dilakukan di Indonesia. Traktor tangan sudah banyak digunakan di banyak tempat. Penggilingan padi menggantikan peran lesung dan alu. Tapi ada juga yang mempertahankan tradisi membajak sawah mengandalkan kerbau atau sapi itu. Alasannya bisa macam-macam. Hal itu



tanah nampaknya juga turut memengaruhi keengganan petani menggunakan alat pertanian bermesin.

Ada lagi yang unik seperti dilansir media massa, di Yogyakarta ada tradisi membajak sawah dengan tenaga manusia. Kalau lazimnya di zaman modern ini membajak sawah dengan traktor, atau setidaknya hewan, sapi atau kerbau yang dikendalikan oleh manusia. Warga yang tinggal tepatnya di Dusun Salam Desa Tewuwuh Kecamatan Dlingo Bantul, selatan Yogyakarta itu justru masih menggunakan tiga hingga empat orang untuk

melakukan kegiatan membajak. Mereka memikul dan menarik alat bajak seperti layaknya sapi atau kerbau. Cara membajak sawah dengan menggunakan tenaga manusia tersebut merupakan warisan nenek moyang yang mereka lestarikan.

### Panen

Puncak acara mengolah sawah yaitu ketika tiba musim panen. Menurut Wikipedia, panen adalah kegiatan mengumpulkan hasil usaha tani dari lahan budidaya. Istilah ini paling umum dipakai dalam kegiatan bercocok tanam dan menandai berakhirnya

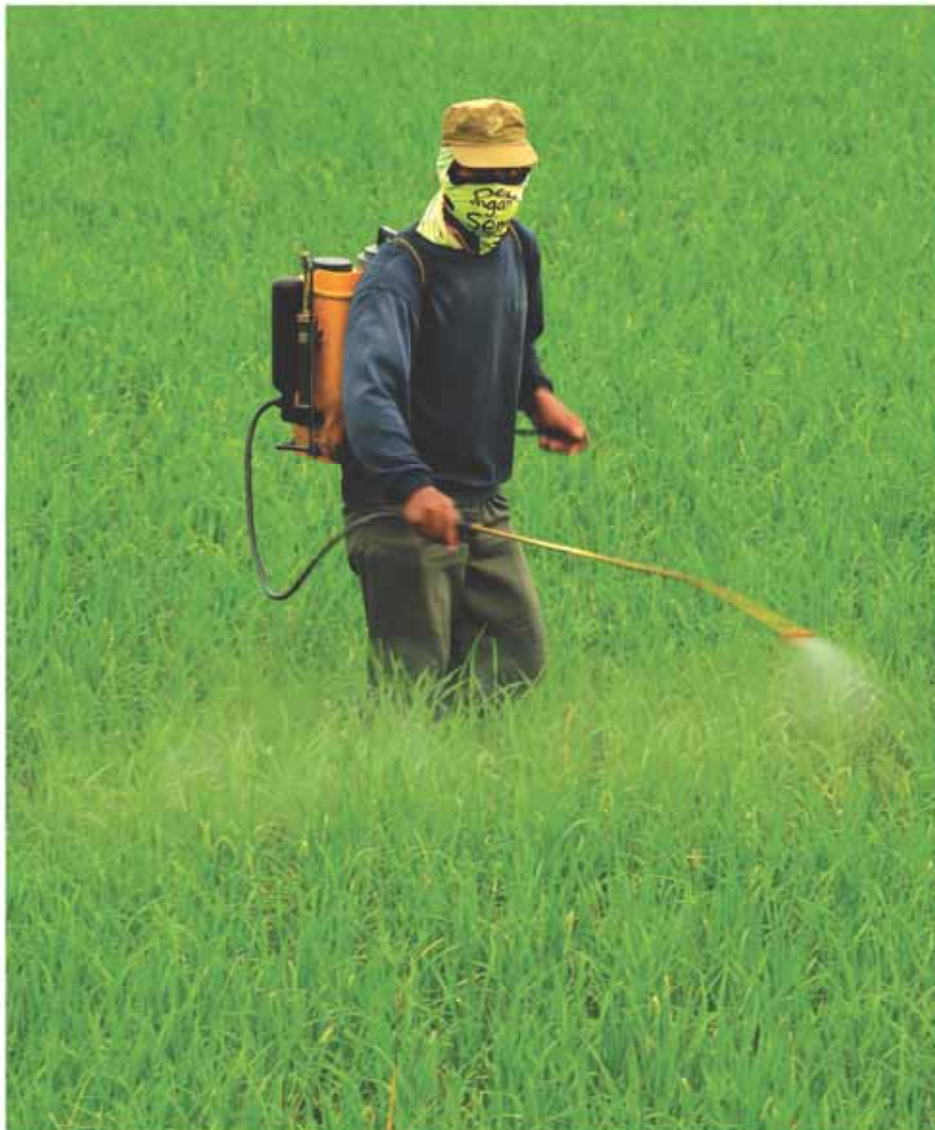
kegiatan di lahan. Namun demikian, istilah ini memiliki arti yang lebih luas, karena dapat dipakai pula dalam budidaya ikan atau berbagai jenis objek usaha tani lainnya, seperti jamur, udang atau alga/gulma laut. Secara kultural, panen dalam masyarakat agraris sering menjadi alasan untuk mengadakan festival, panen raya, Serentaun, dan perayaan-perayaan lainnya.

Panen pada masa kini dapat dilakukan dengan mesin pemanen seperti cobine harvester. Dalam budidaya yang masih tradisional atau setengah tradisional para petani masih menggunakan sabit atau bahkan ani-ani. Alat pemanen lain yang tidak dikenal di Indonesia adalah scythe dan reaper. Panen tanpa mesin merupakan salah satu pekerjaan dalam budidaya yang paling memakan banyak tenaga kerja. Kegiatan ini dapat langsung diikuti dengan proses pascapanen atau pengeringan terlebih dahulu.

Untuk cara panen ini, banyak cara yang bisa petani lakukan. Tetapi yang terbaik adalah kelompok tani mempunyai mesin perontok padi. Keuntungan dengan cara ini adalah menghindari banyaknya butir gabah yang jatuh dan hilang. Selanjutnya







kadar air dalam panen harus mendapat perhatian. Hasil panen dinyatakan dalam Gabah Kering panen (GKP). Biasanya kadar air dalam GKP sekitar 22-25 persen. Setelah dilakukan penjemuran kadar air menjadi 14-15 persen. Dan dalam kondisi gabah seperti ini dinamakan Gabah Kering Giling (GKG). Kemudian yang berhubungan dengan panen itu bagaimana menghitung perkiraan hasil panen.

### Romantisme Sawah

Memahami sawah sebagai

warisan nenek moyang, maka tak akan lepas dari hal-ihwal tradisi perdesaan yang "ramah" lingkungan dan sejatinya menyimpan banyak harapan. Sawah merupakan harapan bagi masyarakat perdesaan. Sawah merupakan warisan yang mengandung tradisi budaya dan falsafah ekonomi dalam menuai rezeki. Bukan isapan jempol belaka, rezeki dari kegiatan bertani seorang petani bisa sanggup ia menyekolahkan anaknya sampai menjadi insinyur atau dokter. Sudah banyak cerita sukses petani

yang telaten menggarap sawah. Banyak kisah, sepetak tanah bisa mengantarkan anak menjadi seorang begawan atau profesor.

Coba juga sekali-sekali Anda belajar berjalan di pematang sawah, bagi yang belum pernah menginjakkan kakinya di sawah. Berjalanlah sambil menggandeng istri atau anak tercinta, sekadar menghilangkan rasa kecut dan kepenatan rutinitas kerja di kota. Panorama pemandangan persawahan yang indah mengajak seseorang untuk berefleksi ke masa silam. Sawah pun menjadi tempat rekreasi "cuci mata". Mata dihibur oleh para petani yang tekun mencangkul; bajak yang ditarik kerbau; atau ibu petani yang menyemai dan menanam bibit. Seiring reembang waktu, padi-padi itu tumbuh, menghijau, dan lalu menguning. Bahkan acapkali ada burung-burung pipit bercanda di tangkai-tangkai padi mematuki bulir-bulir sebelum diusir petani. Sawah dari kejauhan bagaikan permadani. Ingatan melayang ke alam persawahan mendatangkan kesegaran bagi pikiran dan perasaan. Ketika padi sudah menguning, buruh-buruh tani pun siap memanen. Terlukis gambaran padi keemasan menghampar seluas mata memandang. Pepadi melambai disapa angin seolah mengisyaratkan harapan kesejahteraan.

Sayang, lahan persawahan kini sudah banyak yang berganti fungsi menjadi perumahan, gedung perkantoran atau pabrik industri. Bahkan di ibu kota, sawah hanyalah tingggal nama. "Sawah Besar" nama sebuah kecamatan di ibukota Jakarta. Jangan harap Anda akan menjumpai sawah besar yang menghampar luas di kecamatan tersebut, selain riuh lalu lintas kendaraan di jalan raya. ■ **Lukman Ajis Salendra**

# Seputar 17 Agustus 1945

Tepat di hari Jum'at, jam 10.00 pagi, tanggal 17 Agustus, 67 tahun yang lalu. Bangsa Indonesia meriakan kemerdekaannya pada seluruh dunia. Peristiwa itu ditandai dengan sebuah upacara penaikan bendera merah putih dan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, Cikini. Dari seputar peristiwa itu, ternyata banyak catatan sejarah yang tercecer dan belum banyak diketahui masyarakat luas.



**U**ntuk mengenang peristiwa tersebut maka pada kesempatan kali ini, di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 67 tahun, Majalah Progres mencoba mencungkil sedikit ceceran catatan sejarah dari berbagai sumber untuk disajikan kepada pembaca. Berikut kutipannya:

## 1. Soekarno Sakit Saat Proklamirkan Kemerdekaan

Pada 17 Agustus 1945 pukul 08.00 (2 jam sblm pembacaan teks Proklamasi), ternyata Bung Karno masih tidur nyenyak di kamarnya, di Jalan Pegangsaan Timur 56, Cikini. Dia terkena gejala malaria tertiana. Suhu

badannya tinggi dan sangat lelah setelah begadang bersama para sahabatnya menyusun konsep naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Saat itu, tepat di tengah2 bulan puasa Ramadhan.

'Pating greges', keluh Bung Karno setelah dibangunkan dr Soeharto, dokter kesayangannya. Kemudian darahnya dialiri chinineurethan intramusculair dan menenggak pil brom chinine. Lalu ia tidur lagi. Pukul 09.00, Bung Karno terbangun. Berpakaian rapi putih-putih dan menemui sahabatnya, Bung Hatta.

Tepat pukul 10.00, keduanya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari serambi rumah. 'Demikianlah Saudara-saudara!

Kita sekalian telah merdeka!', ujar Bung Karno di hadapan segelintir patriot-patriot sejati. Mereka lalu menyanyikan lagu kebangsaan sambil mengibarkan bendera pusaka Merah Putih. Setelah upacara yang singkat itu, Bung Karno kembali ke kamar tidurnya; masih meriang. Tapi sebuah revolusi telah dimulai...

## 2. Upacara Proklamasi Kemerdekaan Dibuat Sangat Sederhana

Upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ternyata berlangsung tanpa protokol, tak ada korps musik, tak ada konduktor, dan tak ada pancaragam. Tiang bendera pun dibuat dari batang bambu secara kasar, serta ditanam

hanya beberapa menit menjelang upacara. Tetapi itulah, kenyataan yang terjadi pada sebuah upacara sakral yang dinanti-nanti selama lebih dari 300 tahun!

### 3. Bendera dari Seprai

Bendera Pusaka Sang Merah Putih adalah bendera resmi pertama bagi RI. Tetapi dari apakah bendera sakral itu dibuat? Warna putihnya dari kain spre tempat tidur dan warna merahya dari kain tukang soto!



### 4. Akbar Tanjung Jadi Menteri Pertama "Orang Indonesia Asli"

Setelah merdeka 43 tahun, Indonesia baru memiliki seorang menteri pertama yang benar-benar 'orang Indonesia asli'. Karena semua menteri sebelumnya lahir sebelum 17 Agustus 1945. Itu berarti, mereka pernah menjadi warga Hindia Belanda dan atau pendudukan Jepang, sebab negara hukum Republik Indonesia memang belum ada saat itu. 'Orang Indonesia asli' pertama yang menjadi menteri adalah Ir Akbar Tanjung (lahir di Sibolga, Sumatera Utara, 30 Agustus 1945), sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga pada Kabinet Pembangunan (1988-1993)

### 5. Kalimantan Dipimpin 3 Kepala Negara

Menurut Proklamasi 17 Agustus 1945, Kalimantan adalah bagian integral wilayah hukum Indonesia. Kenyataannya, pulau tersebut paling unik di dunia. Di pulau tersebut, ada 3 negara yang memerintah, yaitu Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.

### 6. Setting Revolusi di Indonesia Diangkat Ke Film

Ada lagi hubungan erat antara 17 Agustus dan Hollywood. Judul pidato 17 Agustus 1964, 'Tahun Vivere Perilocosos' (Tahun yang Penuh Bahaya), telah dijadikan judul sebuah film - dalam bahasa Inggris; 'The Year of Living Dangerously'. Film tersebut menceritakan pengalaman seorang wartawan Australia yg ditugaskan di Indonesia pada 1960-an, pada detik2 menjelang peristiwa berdarah th 1965. Pada 1984, film yang dibintangi Mel Gibson itu mendapat Oscar untuk kategori film asing!

### 7. Naskah Asli Proklamasi Ditemukan di Tempat Sampah

Naskah asli teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta, ternyata tidak pernah dimiliki dan disimpan oleh Pemerintah! Anehnya, naskah historis tersebut justru disimpan dengan baik oleh wartawan BM Diah. Diah menemukan draft proklamasi itu di keranjang sampah di rumah Laksamana Maeda, 17 Agustus 1945 dini hari, setelah disalin dan diketik oleh Sajuti Melik. Pada 29 Mei 1992, Diah menyerahkan draft tersebut kepada Presiden Soeharto, setelah menyimpannya selama 46 tahun 9 bulan 19 hari.

### 8. Soekarno Memandikan Penumpang Pesawat dengan Air Seni

Rasa-rasanya di dunia ini, hanya *the founding fathers* Indonesia yang pernah mandi air seni. Saat pulang dari Dalat (Cipanasnya Saigon), Vietnam, 13 Agustus 1945, Soekarno bersama Bung Hatta, dr Radjiman Wedyodiningrat dan dr Soeharto (dokter pribadi Bung Karno) menumpang pesawat fighter bomber bermotor ganda. Dalam perjalanan, Soekarno ingin sekali buang air kecil, tetapi tak ada tempat. Setelah dipikir, dicari jalan keluarnya untuk hasrat yang tak tertahan itu. Melihat lubang-lubang kecil di dinding pesawat, di situlah Bung Karno melepaskan hajat kecilnya. Karena angin begitu kencang sekali, bersemburlah air seni itu dan membasahi semua penumpang.

### 9. Negatif Film Foto Kemerdekaan Disimpan Di Bawah Pohon

Berkat kebohongan, peristiwa sakral Proklamasi 17 Agustus 1945 dapat didokumentasikan dan disaksikan oleh kita hingga kini. Saat tentara Jepang ingin merampas negatif foto yang mengabadikan peristiwa penting tersebut, Frans Mendoer, fotografer yang merekam detik-detik proklamasi, berbohong kepada mereka. Dia bilang tak punya negatif itu dan sudah diserahkan kepada Barisan Pelopor, sebuah gerakan perjuangan. Mendengar jawaban itu, Jepang pun marah besar. Padahal negatif film itu ditanam di bawah sebuah pohon di halaman Kantor harian *Asia Raja*. Setelah Jepang pergi, negatif itu diafdruk dan dipublikasi secara luas hingga bisa dinikmati sampai sekarang. Bagaimana

kalau Mendoer bersikap jujur pada Jepang?

## 10. Bung Hatta Berbohong Demi Proklamasi

Kali ini, Bung Hatta yang berbohong demi proklamasi. Waktu masa revolusi, Bung Karno memerintahkan Bung Hatta untuk meminta bantuan senjata kepada Jawaharlal Nehru. Cara untuk pergi ke India pun dilakukan secara rahasia. Bung Hatta memakai paspor dengan nama 'Abdullah, co-pilot'. Lalu beliau berangkat dengan pesawat yang dikemudikan Biju Patnaik, seorang industrialis yang kemudian menjadi menteri pada kabinet PM Morarji Desai. Bung Hatta diperlakukan sangat hormat oleh Nehru dan diajak bertemu Mahatma Gandhi.

Nehru adalah kawan lama Hatta sejak 1920-an dan Dandhi mengetahui perjuangan Hatta. Setelah pertemuan, Gandhi diberi tahu oleh Nehru bahwa 'Abdullah' itu adalah Mohammad Hatta. Apa reaksi Gandhi? Dia marah besar kepada Nehru, karena tidak diberi tahu yang sebenarnya. 'You are a liar!' ujar tokoh kharismatik itu kepada Nehru. *Sumber: www.dirtga.com*

## Kejadian Disekitar Proklamasi 17 Agustus 1945

Pada tanggal 6 Agustus dengan tidak disangka-sangka jatuhnya bom atom pertama Amerika Serikat atas kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus jatuh bom atom yang kedua di kota Nagasaki, selanjutnya tanggal 15 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat, hal mana diketahui oleh pemuda revolusioner di Jakarta.

Menurut Adam Malik dalam bukunya yang berjudul "Riwayat Proklamasi", maka pada saat itu di Jakarta terdapat 4 golongan

pemuda revolusioner yang bergerak secara tersembunyi, yaitu :

- Golongan Sukarni, termasuk antara lain Kusnaeni, Adam Malik, Panduwiguna, Maruto Nitimihardjo dan Armunanto
- Golongan Sjahrir, termasuk Soedarsono, Hamdani dan Soepeno
- Golongan Pelajar, termasuk Chairul Saleh, Soebadio, Eri Soedewo dan Djohar Nur
- Golongan Kaigun, termasuk Mr.Subardjo, Sudiro (Mbah) dan Wikana

Dari empat golongan tadi, terutama golongan Sukarni dan golongan pelajarlah yang bersikap tegas, sedangkan golongan Sjahrir masih agak bimbang dan ragu-ragu serta golongan Kaigun masih sikap "maju-mundur".

Maka pada tanggal 15 Agustus 1945 keempat golongan tersebut mengadakan rapat gabungan bertempat diruangan belakang gedung Bacteriologis Laboratorium di Pegangsaan Timur, dimulai jam 8 malam dibawah pimpinan Chairul Saleh. Rapat memutuskan, supaya Kemerdekaan harus segera diproklamasikan oleh Bangsa Indonesia sendiri, lepas dari campur tangan bangsa asing. Wikana dan Darwis ditugaskan untuk menyampaikan putusan itu kepada Soekarno/Hatta.

Jam 10 malam utusan diterima Bung Karno di Pegangsaan Timur 56, maka jawaban Bung Karno adalah bahwa penyerahan Jepang itu secara resmi belum diketahuinya, bahwa Kemerdekaan pasti tercapai karena telah dijanjikan Jepang dan segala persiapan sudah selesai. Pada saat itu datanglah Bung Hatta, yang menyatakan sebagai pendapatnya bahwa kita

menunggu berita resmi tentang penyerahan Jepang, dan minta pertimbangan dari Gunseikan dan Soomubutyo tentang janji Kemerdekaan dari Jenderal Terauchi.

Jam 11.30 utusan dengan tangan hampa meninggalkan Pegangsaan Timur 56, dan Jam 12 tengah malam memberikan laporannya kepada rapat gabungan yang dilanjutkan di gedung Tjikini 71 (Cikini). Rapat memutuskan supaya Soekarno/Hatta dibawa keluar kota, yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Chairul Saleh, Sukarni, Singgih dari Peta, Kunto dan Dr. Muwardi.

Jam 4 pagi Sukarni dan Kunto pergi ke rumah Bung Hatta, yang dibawanya ke rumah Bung Karno, dimana sudah berkumpul Chairul Saleh, asmoro dan Dr.Muwardi. Dengan alasan bahwa semangat rakyat dan pemuda demikian meluapnya sehingga keamanan Bung Karno dan Bung Hatta terancam apabila masih tinggal di Jakarta, maka jam 4.30 pagi dengan dikawal oleh sebuah mobil escorte dari Peta berangkatlah Bung Karno beserta istri dan Guntur dalam satu mobil, dan Bung Hatta, Sukarni dan Kunto dalam mobil kedua menuju Rengasdengklok.

Ternyata bahwa Soekarno/Hatta masih tetap bimbang untuk melakukan Proklamasi karena belum ada berita resmi tentang penyerahan Jepang. Maka diutuslah Kunto kembali ke Jakarta untuk mendapatkan berita resmi itu. Jam 4 sore tanggal 16 Agustus Kunto tiba kembali di Rengasdengklok dengan membawa Subardjo SH dan Sudiro (Mbah). Mereka menegaskan bahwa benar Jepang sudah menyerah kalah, atas penegasan nama Dwitunggal



sanggup melakukan Proklamasi, akan tetapi harus dilakukan di Jakarta. Mula-mula Sukarni keberatan, namun setelah Subardjo SH menjamin keamanan Dwitunggal di rumah Laksamana Muda Maeda di Oranje Boulevard (Jalan Diponegoro), maka jam 10 malam semua berangkat kembali ke Jakarta. Jam 12 tengah malam tiba di rumah Maeda, dimana sudah berkumpul Diah, Semaun Bakri, Sajuti Melik dan Iwa Kusuma Sumatri. Kemudian menyusul juga Chairul Saleh.

Sukarni mengajukan naskah proklamasi yang berbunyi :

"Dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Segala badan Pemerintahan yang ada harus direbut oleh rakyat dari orang-orang asing yang masih mempertahankannya"

Dwitunggal menolak naskah itu, karena dengan redaksi itu Jepang pasti menghantam rakyat habis-habisan. Akhirnya dapat disetujui naskah Proklamasi yang ditanda tangani Soekarno-Hatta pada jam 2 malam di rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Diponegoro dan akan diucapkan oleh Bung Karno pada esok harinya di Pegangsaan Timur 56.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 telah banyak yang berkumpul

dihalaman rumah kediaman Bung Karno dengan Bung Hatta disampingnya mengucapkan Proklamasi Kemerdekaan, disertai dengan pidato singkat sebagai berikut :

"Saudara-saudara sekalian!

Saya telah meminta saudara-saudara hadir disini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun.

Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan turunya, tetapi jiwa kita tetap menuju arah cita-cita.

Juga didalam jaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Didalam jaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakekatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya pada kekuatan sendiri.

Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air didalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani

mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kekuatannya.

Maka kami, tadi malam telah mengadakan musyawarat dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia, dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.

Saudara-saudara dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu.

"Demikianlah Saudara-saudara!

Kita sekarang telah merdeka! Tidak ada satu ikatan yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita!

Mulai saat ini kita menyusun Negara kita! Negara Merdeka!

Negara Republik Indonesia, \_ merdeka kekal dan abadi

Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.

■ Sumber: Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia; Tahapan Revolusi Bersendjata 1945-1950 oleh Drs.Sutanto Tirtoprodjo SH, PEM Books, Jakarta,1966.